Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja tahun 2022 BPPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sepanjang tahun 2022 dari sebanyak 22 IKU kesemuanya memenuhi target atau berstatus hijau. Perincian 22 IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (realisasi sebesar 91,01 dari target 85 (skala 100)).
2. Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi (realisasi sebesar 86,84 dari target 80).
3. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya (realisasi sebesar 88,78% dari target 82%).
4. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya (realisasi sebesar 98,85% dari target 85%).
5. Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati (realisasi sebesar 94,05% dari target 70).
6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (realisasi sebesar 88,69 dari target 85).
7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (realisasi sebesar 4,8 dari target 4,45).
8. Indeks Kualitas Penelitian (realisasi sebesar 546,5 dari target 335).
9. Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan (realisasi sebesar 99,41 dari target 80%).
10. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran (realisasi sebesar 5 dari target 4).
11. Tingkat Validasi Program Pembelajaran (realisasi sebesar 120 dari target 100).
12. Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi (realisasi sebesar 99,32% dari target 85%).
13. Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC (realisasi sebesar 115,29% dari target 100%).
14. Tingkat Kematangan *Knowledge Management* (realisasi sebesar 4 dari target 3).
15. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM (realisasi sebesar 115,13 dari target 100).
16. Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu (realisasi sebesar 94,60% dari target 92%).
17. Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu (realisasi sebesar 120 dari target 100).
18. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (realisasi sebesar 3,91 dari target 3,55).
19. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 (realisasi sebesar 112,78 dari target 100).
20. Tingkat Penggunaan Aset Bersama (realisasi sebesar 110% dari target 25).
21. Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK (realisasi sebesar 109,31 dari target 100).

22. Indeks Integritas Organisasi (realisasi sebesar 107,97 dari target 95,3).

Capaian kinerja dari keseluruhan IKU tersebut menyumbang Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK tahun 2022 sebesar **113,20**. NKO tersebut meningkat dari NKO BPPK periode tahun 2021 yaitu sebesar 112,94.

Untuk mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode tahun 2022, BPPK memiliki total pagu anggaran sebesar Rp428.521.434.000,00. Sepanjang tahun 2022 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp389.276.595.167,00 (90,84% dari total pagu) dengan perincian menurut kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi dengan realisasi sebesar Rp5.158.000,00 atau tercapai sebesar 11,45% dari pagu anggaran sebesar Rp45.048.000,00.
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan realisasi sebesar Rp75.999.742.552,00 atau tercapai sebesar 91,71% dari pagu anggaran sebesar Rp82.866.072.000,00.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan realisasi sebesar Rp70.119.419.301,00 atau tercapai sebesar 98,92% dari pagu anggaran sebesar Rp70.883.312.000,00.
4. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan realisasi sebesar Rp439.852.682,00 atau tercapai sebesar 53,08% dari pagu anggaran sebesar Rp828.643.000,00.
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan realisasi sebesar Rp1.060.370.080,00 atau tercapai sebesar 73,28% dari pagu anggaran sebesar Rp1.446.943.000,00.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan realisasi sebesar Rp192.601.149.687,00 atau tercapai sebesar 92,73% dari pagu anggaran sebesar Rp207.698.963.000,00.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan realisasi sebesar Rp48.933.057.648,00 atau tercapai sebesar 75,80% dari pagu anggaran sebesar Rp64.550.992.000,00.
8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp46.308.341,00 atau tercapai sebesar 56,53% dari pagu anggaran sebesar Rp81.908.000,00.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp3.236.500,00 atau tercapai sebesar 14,42% dari pagu anggaran sebesar Rp22.439.000,00.
10. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi dengan realisasi sebesar Rp68.300.376,00 atau tercapai sebesar 70,33% dari pagu anggaran sebesar Rp97.114.000,00.

Dari segi capaian *output*, capaian BPPK periode Tahun 2022 secara umum sudah cukup baik. Keseluruhan dari total 63 Rincian *Output* (RO) yang dimiliki BPPK memiliki realisasi 100% atau lebih. Itu artinya semua target *output* telah terpenuhi. Adapun rata-rata nilai capaian RO adalah sebesar 156,57%.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2022 ini kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja BPPK untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas yang diamanatkan selama tahun 2022. Selama tahun 2022 BPPK terus melanjutkan transformasi besar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui konversi kegiatan tatap muka menjadi Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning* yang sudah dimulai sejak wabah pandemi awal tahun 2020. Di sisi lain, BPPK juga masih mengemban amanat lain berupa upaya mewujudkan Kementerian Keuangan menjadi *learning organization* dengan didukung oleh manajemen pengetahuan yang maju.

Laporan Kinerja ini memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja. Laporan Kinerja ini berisi pula realisasi anggaran BPPK selama kurun waktu tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini seyogianya tidak hanya memenuhi kewajiban formal. Laporan Kinerja harus mampu memberikan gambaran mengenai progres yang sudah dicapai oleh BPPK dalam merespons perubahan-perubahan. Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna peningkatan kinerja BPPK pada periode-periode berikutnya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada *stakeholder*. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari para *stakeholder* BPPK akan mampu memberikan manfaat besar kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Salam BPPK,

Andin Hadiyanto
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **i**

Kata Pengantar **iii**

Daftar Isi **iv**

Daftar Tabel **v**

Daftar Gambar **vi**

1 Pendahuluan **5**
A Latar Belakang 5
B Tugas dan Fungsi 6
C Peran Strategis 6
D Struktur Organisasi 7
E Sistematika Laporan 9

2 Perencanaan Kinerja **13**
A Rencana Strategis 13
B Rencana Kerja 2022 18
C Rencana Kerja dan Anggaran 2022 20
D Penetapan Perjanjian Kinerja 24

3 Akuntabilitas Kinerja **33**
A Capaian Renstra 33
B Capaian Kinerja Organisasi 35
C Realisasi Anggaran 90
D Realisasi *Output* 94
E Kinerja Lain-Lain 98

4 Penutup **113**

Lampiran **115**
Perjanjian Kinerja 118
Adendum Perjanjian Kinerja 126

Daftar Tabel

2.1	Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020-2024	16
2.2	Sasaran Program (*Outcome*) dan IKP Tahun 2022 (alokasi dalam ribuan rupiah)	19
2.3	Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2022 (alokasi dalam ribuan rupiah)	19
2.4	Perincian Perubahan Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2022	23
2.5	Perincian Perubahan Anggaran Kegiatan BPPK Tahun Anggaran 2022	23
2.6	Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK	29
3.1	Capaian Renstra BPPK Tahun 2021 dan Tahun 2022	33
3.2	Target, Realisasi, dan Capaian IKU BPPK Tahun 2022	35
3.3	Perincian Nilai Tingkat Implementasi LO se-Kementerian Keuangan	41
3.4	Sebaran Program Kebutuhan dan Target Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Tahun 2022	42
3.5	Perincian Nilai Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi se-Kementerian Keuangan	44
3.6	Kategori Penilaian Ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi	53
3.7	Perincian IKPL Kementerian Keuangan Tahun 2022	56
3.8	Realisasi Penelitian yang Dipublikasikan Periode Tahun 2022	58
3.9	Perincian Capaian IS Kementerian Keuangan Tahun 2022	74
3.10	Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Aset Bersama di Lingkungan Kemenkeu	86
3.11	Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja	91
3.12	Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2022 Menurut Kegiatan	92
3.13	Realisasi *Output* BPPK Tahun 2022	94
3.14	SDM BPPK Menurut Level Unit	101
3.15	SDM BPPK Menurut Pendidikan	101
3.16	Data Terpilah PUG (Menurut Jenis Kelamin)	102
3.17	Perincian Kegiatan Studi Banding/ *Benchmarking* oleh Instansi Lain	104

Daftar Gambar

1.1	Struktur Organisasi BPPK	8
2.1	Peta Strategi BPPK Tahun 2022	25
3.1	Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK	35
3.2	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja	91
3.3	Kunjungan *Benchmarking* dari Kementerian Luar Negeri Terkait Jabatan Fungsional	107
3.4	Kunjungan *Benchmarking* dari PT Hutama Karya (Persero) Terkait Implementasi Kementerian Keuangan *corporate university*	107
3.5	Penganugerahan BPPK pada Top Digital Awards 2022	108
3.6	Penyerahan Predikat ZI WBBM pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Kemenkeu Tahun 2022	108

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 1 | Pendahuluan

A	Latar Belakang	5
B	Tugas dan Fungsi	6
C	Peran Strategis	6
D	Struktur Organisasi	7
E	Sistematika Laporan	9

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.

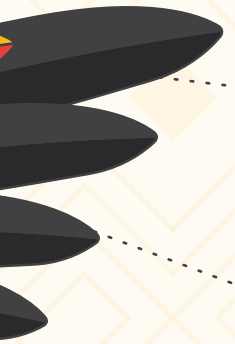

BAB 1 | Pendahuluan

> “Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2022 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPK pada periode yang akan datang.”

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Periode Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2022 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPK pada periode yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyeleng-garakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. Peran Strategis

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara. Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, akuntabel, dan andal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang *link and match* dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan *link and match* antara pengembangan kompetensi SDM dengan tujuan strategis organisasi, Kementerian Keuangan sejak tahun 2016 telah menerapkan strategi *corporate university*. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat strategis, jabatan, individual, maupun kebutuhan yang sifatnya insidental maka Kementerian Keuangan melakukan pendekatan yang sifatnya proaktif dan tidak lagi reaktif melalui mekanisme pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).

Adapun BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan strategi Kementerian Keuangan *corporate university*, BPPK memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi SDM dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Berikut adalah permasalahan utama yang dihadapi BPPK dalam menjalankan peran tersebut.

a. Pelatihan
   - Kementerian Keuangan *corporate university* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan.
   - Minimnya kontrol atas kesesuaian pengiriman peserta dengan pembelajaran.
   - Belum terintegrasinya pembelajaran dengan *career path*.
   - Pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya dikonsolidasikan melalui BPPK. Masih ada unit eselon I yang menyelenggarakan pelatihan secara mandiri tanpa koordinasi dengan BPPK.
   - Belum optimalnya penjaminan mutu pembelajaran.

b. Manajemen Pengetahuan
   - Manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan belum sinergi dan efektif.
   - Pemanfaatan pengetahuan belum optimal sebagai solusi penyelesaian pekerjaan.
   - Budaya belajar dan berbagi pengetahuan masih relatif rendah.

c. Sistem Tata Kelola dan Sumber Daya
   - Pengelolaan Teknologi Informasi belum sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh BPPK, masih bergantung (*hosting*) dengan Pusintek.
   - Pandemi COVID-19 mendorong terwujudnya kebiasaan baru (*new normal*) dalam proses pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan manajemen pengetahuan.

D. Struktur Organisasi

BPPK terdiri atas Sekretariat Badan, enam pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Keenam pusdiklat tersebut antara lain Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP), Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai (Pusdiklat BC), Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK), dan Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU).

Untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri atas sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK) dan satu Balai Diklat Kepemimpinan. Kesebelas BDK tersebut antara lain BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Struktur organisasi BPPK adalah sebagaimana terlihat dalam **Gambar 1.1** berikut.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi BPPK

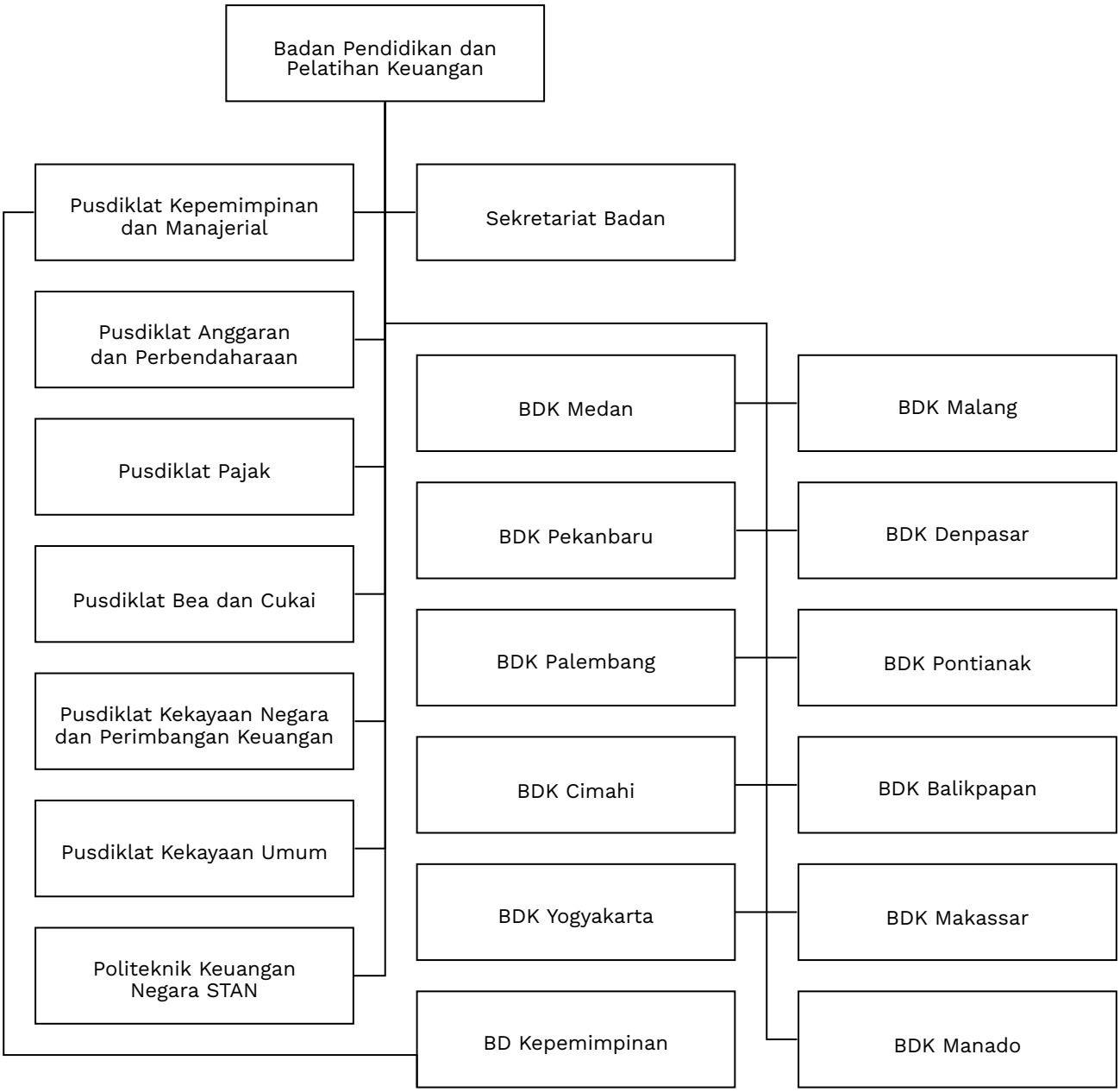

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPPK; peran strategis dan permasalahan utama yang dihadapi BPPK; serta sistematika penyajian.

Bab 2. Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan rencana strategis BPPK; rencana kerja BPPK tahun 2022; rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2022; dan penetapan perjanjian kinerja.

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian rencana strategis BPPK; capaian kinerja BPPK tahun 2022; realisasi anggaran BPPK tahun 2022; realisasi capaian *output* BPPK tahun 2022; dan kinerja lain-lain.

Bab 4. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPPK serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BPPK untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2 | Perencanaan Kinerja

A	Rencana Strategis	13
B	Rencana Kerja 2022	18
C	Rencana Kerja dan Anggaran 2022	20
D	Penetapan Perjanjian Kinerja	24

Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km^2. Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia.

BAB 2 | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, seluruh organisasi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun rencana strategis (renstra) 2020-2024. Dalam hal ini BPPK telah menetapkan Renstra Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024. Adapun Renstra tersebut berisi tentang visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

BPPK telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu **Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"**. Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, BPPK juga memperbarui misinya selama periode 2020-2024 agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 5 "Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi". Adapun misi BPPK ditetapkan sebagai berikut:

a. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *corporate university*.
b. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *corporate university*.
c. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
d. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *corporate university*.
e. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BPPK menetapkan Tujuan BPPK Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan

Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 nomor 5, yaitu “Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam tujuan tersebut yang didukung oleh BPPK adalah organisasi dan SDM yang optimal. Adapun indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah:

a. Tingkat implementasi *learning organization*;
b. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya;
c. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik; dan
d. Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (*Competency Gap Index/ CGI*).

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun tujuh arah kebijakan dan 18 strategi untuk mendukung pencapaian ketujuh arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Arah Kebijakan 1:
Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purposes* di bidang keuangan negara, termasuk pada penggunaan teknologi informasi

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

a. Penguatan kurikulum pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link and match)* dan berbasis nilai (*value based education*).
b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.

Arah Kebijakan 2:
Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal

Strategi untuk mewujudkannya adalah:

a. Penyelarasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan manajemen talenta.
b. Pengembangan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

Arah Kebijakan 3:
Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

a. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAIA (*Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible*) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kementerian Keuangan.
b. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara.
c. Optimalisasi pengelolaan pelatihan/ pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID.
d. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

Arah Kebijakan 4:
Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah melalui:

a. Harmonisasi kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
b. Penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang

keuangan negara yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 5:
Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

a. Pembangunan kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan engara.
b. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

Arah Kebijakan 6:
Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *corporate university*

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *corporate university*.
b. Pengembangan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi.
c. Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi terbaik.
d. Pengelolaan Badan layanan Umum (BLU) yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 7:
Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Pembangunan infrastruktur dan penguatan implementasi *sharing facilities* berbasis keunggulan komparatif.
b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

4. Matriks Target Kinerja

Dalam memastikan ketercapaian setiap sasaran strategis dan program, diperlukan rumusan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang merupakan matriks terukur sebagai panduan dan komitmen kinerja.

Tabel 2.1 berikut menjabarkan indikator-indikator kinerja beserta target-targetnya untuk tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra BPPK tahun 2020-2024.

Tabel 2.1: Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	UIC
1	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	93%	93%	93%	93%	PKN STAN
2	Indeks kualitas penelitian	90	148	193	238	283	PKN STAN
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	75%	80%	82%	85%	Pusdiklat PSDM
4	Tingkat implementasi *learning organization**	75%	77%	80%	82%	85%	Setban, Seluruh Pusdiklat, dan PKN STAN
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	90%	80%	82%	85%	87%	Seluruh Pusdiklat
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	84%	85%	86%	87%	Seluruh Pusdiklat
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	93%	-	-	-	Seluruh Pusdiklat, Balai
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	92%	94%	Seluruh Pusdiklat
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	70%	70%	70%	80%	Seluruh Pusdiklat
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	Seluruh Pusdiklat
11	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	80%	80%	80%	80%	Pusdiklat
12	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat
13	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	2***	2****	3****	Pusdiklat
14	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai*****	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Seluruh Pusdiklat

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	UIC
15	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ******	93,67%	94%	94%	94%	94%	Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN
16	Persentase kualitas pengelolaan BLU******	80%	80%	80%	80%	80%	PKN STAN
17	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK******	85%	87%	90%	92%	95%	Setban

*: Pada tahun 2020, memiliki lingkup UE1 BPPK. Mulai tahun 2021 lingkup menjadi level Kemenkeu
**: Pada tahun 2021 akan ada reformulasi yang menyebabkan target turun
***: BPPK
****: Kemenkeu
*****: 0,25% persentase jam pelatihan SDM keuangan KLID termasuk ke dalam 4,5% persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu
******: *Mandatory* Kemenkeu

5. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan lima tujuan dan strategi yang ada di renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan menetapkan dua belas program pada tahun 2020 menjadi lima program pada tahun 2021–2024.

Sebelum Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 BPPK menetapkan program "Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara". Adapun sasaran program (*outcome*)-nya adalah SDM yang Berkinerja Tinggi. Selain itu, ditetapkan sembilan kegiatan di lingkungan BPPK Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
b. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
c. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai;
d. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
e. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
f. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan;
g. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan;
h. Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara; dan
i. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah.

Setelah Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2021–2024)

Sementara itu, untuk tahun 2021–2024 dilakukan restrukturisasi program di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga program yang ditetapkan di BPPK adalah "Program Dukungan Manajemen". Adapun sasaran program berupa organisasi dan SDM yang optimal sedangkan indikator program

yang ditetapkan adalah tingkat implementasi *learning organization*. Kegiatan-kegiatan pada program ini antara lain:

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM;
b. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum;
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
e. Legislasi dan Litigasi; dan
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal.

> “Penyusunan Renja BPPK telah dilakukan pada tahun 2021, sejalan dengan informasi Bappenas terkait rancangan awal RKP Tahun 2022.”

B. Rencana Kerja 2022

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPK telah dilakukan pada tahun 2021, sejalan dengan informasi Bappenas terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja diperinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja kemudian digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume, dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan ke dalam renstra. Hal ini karena adanya kebijakan, kebutuhan, atau kondisi eksternal dan internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan renstra.

Tabel 2.2 berikut menggambarkan perincian sasaran program (*outcome*) dan indikator kinerja program beserta alokasi anggaran pada tahun anggaran 2022 sesuai data pada aplikasi KRISNA Bappenas.

Tabel 2.2: Sasaran Program (*Outcome*) dan IKP Tahun 2022 (alokasi dalam ribuan rupiah)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2022	Alokasi 2022
01	**Organisasi dan SDM yang Optimal**		**484.871.138**
01.23	Tingkat implementasi *learning organization* - Kementerian Keuangan (BPPK)	80	
01.24	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (BPPK)	4,1 (skala 5)	
02	**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**		**182.514**
02.14	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (BPPK)	90	
03	**Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah**		**88.729**
03.11	Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (BPPK)	91 (skala 100)	
	Total		**485.142.381**

Sementara itu perincian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersaji dalam **Tabel 2.3** berikut.

Tabel 2.3: Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2022 (alokasi dalam ribuan rupiah)

Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2022	Alokasi 2022
4678	**Legislasi dan Litigasi**		
01	**Legislasi dan Litigasi yang Optimal**		**45.048**
01.01	Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara	100	
4679	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**		
01	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel**		**79.139.150**
01.01	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95	
01.02	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	
4680	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)**		
01	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel**		**69.510.293**
01.01	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95	
4681	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**		

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2022	Alokasi 2022
01	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kementerian Keuangan**		**699.533**
01.01	Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	
01.02	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	
4682	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)**		
01	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kementerian Keuangan**		**1.017.117**
01.01	Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	
4683	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**		
01	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi**		**261.487.658**
01.01	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Perilaku Kerjanya	82	
01.02	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	94	
4684	**Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)**		
01	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi**		**72.972.339**
01.01	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	90	
4685	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**		
01	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif**		**66.290**
01.01	Indeks Efektivitas UKI	75	
4686	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)**		
4687	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi**		
01	**Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal**		**182.514**
01.01	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90	

Dari **Tabel 2.3** di atas terlihat bahwa nama-nama kegiatan selain Kegiatan Legislasi dan Litigasi dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki dua uraian nama kegiatan yang sama. Hal tersebut karena terdapat pemisahan kode untuk fungsi pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Keuangan Negara STAN.

C. Rencana Kerja dan Anggaran 2022

Rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2022 disusun berdasarkan RKP, renja Kementerian Keuangan, renja BPPK, dan alokasi pagu anggaran tahun 2022. Dalam perjalanan sepanjang tahun 2022, pagu anggaran BPPK mengalami beberapa kali perubahan dan pergeseran. Beberapa perubahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Revisi Integrasi Satker BPPK, Revisi DIPA tanggal 24 Mei 2022.

   Revisi ini merupakan kewenangan DJA. Adapun revisi ini terkait dengan integrasi satker BPPK. Pagu anggaran Sekretariat Badan atau satker BPPK (411868) mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan pagu anggaran pusdiklat-pusdiklat yang mengalami penurunan. Selain itu, revisi ini juga menambah alokasi belanja modal pada Pusdiklat Bea dan Cukai guna memenuhi kebutuhan renovasi rumah dinas sebesar Rp4.376.553.000,00. Terdapat pula penambahan belanja modal berupa peralatan meubelair Ruang Menteri Keuangan pada pagu anggaran Sekretariat Badan. Pada perubahan terkait integrasi satker BPPK, terdapat pula penambahan pagu pada PKN STAN dan BDK Malang yang bersumber dari satker BPPK (411868). Penambahan pagu anggaran pada PKN STAN akan dialokasikan untuk keperluan pembayaran gaji PPNPN dari Pusdiklat KNPK dan Pusdiklat KM yang pengelolaannya sudah dipindahkan ke PKN STAN. Adapun penambahan pagu anggaran pada BDK Malang dialokasikan untuk renovasi rumah dinas dan belanja peralatan meubelair untuk rumah dinas tersebut.

b. Revisi *Automatic Adjustment*, Revisi DIPA tanggal 6 Juni 2022.

   Revisi ini dilakukan untuk menindaklanjuti nota dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.1/2022 hal Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2022. Dalam nota dinas tersebut target BPPK adalah sebesar Rp29.025.729.000,00. Adapun revisi *automatic adjustment* ini adalah berupa pemblokiran anggaran sebesar target tersebut.

c. Revisi Integrasi Gaji, Revisi DIPA tanggal 14 Juni 2022.

   Revisi ini dilakukan terkait proses sentralisasi gaji. Dalam proses sentralisasi gaji ini, pembayaran gaji pegawai bulan Juli 2022 akan dibayarkan menggunakan DIPA Sekretariat Jenderal. Adapun untuk pembayaran uang makan dan uang lembur masih tetap dibayarkan menggunakan DIPA satker masing-masing. Dengan revisi integrasi gaji ini, pagu anggaran belanja pegawai BPPK mengalami pengurangan sebesar 43.498.255.000,00.

d. Revisi Kewenangan DJA, Revisi DIPA tanggal 19 September 2022

   Revisi ini dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut.

   - Pembukaan blokir *automatic adjustment*, sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-288/MK.2/2922 tanggal 24 Agustus 2022 hal Penghapusan Sebagian Blokir *Automatic Adjustment* TA 2022 Kementerian Keuangan. Adapun alokasi yang disetujui dibuka untuk BPPK adalah sebesar Rp15.461.320.000,00.
   - Perubahan volume *Rincian Output* (RO) berupa kenaikan dan penurunan volume RO Peralatan Fasilitas Perkantoran, RO Kajian Akademis, RO Pembelajaran Klasikal, RO Transformasi Akademik Melalui Pengembangan Kurikulum Akademik, Pembangunan Karakter, dan Transformasi Dosen, RO Sertifikasi Kompetensi, dan RO Pembelajaran Digital.
   - Kebutuhan penambahan anggaran belanja modal untuk penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Pembangunan Renovasi Gedung *Guest House* Pusdiklat Bea dan Cukai karena penyesuaian atas

perubahan harga bahan baku dan upah.
- Kebutuhan penambahan anggaran belanja non-operasional untuk kegiatan pelatihan, mutasi pegawai, dan kebutuhan perjalanan dinas karyasiswa sebagai dampak kenaikan kurs mata uang asing.
- Kebutuhan penambahan belanja operasional, seperti kebutuhan listrik dan pemeliharaan gedung dan bangunan, akibat peningkatan kapasitas pegawai WFO dan peningkatan pelatihan yang diselenggarakan secara klasikal.

e. Revisi Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Tahap Kedua, Revisi DIPA tanggal 9 November 2022.

Revisi ini berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-450/MK.2/2022 tanggal 28 Oktober 2022 hal Penghapusan Sisa Blokir *Automatic Adjustment* TA 2022 Kementerian Keuangan. Adapun alokasi yang disetujui untuk dibuka blokirnya pada BPPK adalah sebesar Rp441.717.000,00. Alokasi tersebut digunakan untuk anggaran mutasi pegawai.

f. Revisi Pemenuhan Kendaraan Dinas Fungsional, Revisi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 30 November 2022.

Revisi ini dilakukan karena terdapat kebutuhan penambahan volume RO Kendaraan bermotor pada satker BPPK (411868) sebanyak satu unit kendaraan dinas fungsional.

g. Revisi Pergeseran Sisa Blokir dari BA KL ke BA BUN, Revisi DIPA tanggal 2 Desember 2022.

Dalam revisi ini terdapat pergeseran anggaran sisa yang terblokir sebesar Rp13.122.692.000,00 yang kemudian digeser dari BA K/L ke BA BUN.

> “Rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2022 disusun berdasarkan RKP, renja Kemenkeu, renja BPPK, dan alokasi pagu anggaran tahun 2022.”

Perubahan pagu anggaran BPPK awal tahun dan pagu anggaran BPPK revisi terakhir tergambar dalam **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4: Perincian Perubahan Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2022

	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih
Pendapatan BLU	13.259.000.000	13.259.000.000	0
PNBP Lainnya	1.051.100.000	1.051.100.000	0
Jumlah Pendapatan	**14.310.100.000**	**14.310.100.000**	**0**
Belanja Pegawai	96.250.757.000	52.752.502.000	43.498.255.000
Belanja Barang	333.226.235.000	319.040.393.000	14.185.842.000
Belanja Modal	55.665.389.000	56.728.539.000	-1.063.150.000
Jumlah Belanja	**485.142.381.000**	**428.521.434.000**	**56.620.947.000**

Adapun penjabaran perubahan pagu anggaran program BPPK ke dalam kegiatan-kegiatan adalah sebagaimana **Tabel 2.5** berikut.

Tabel 2.5: Perincian Perubahan Anggaran Kegiatan BPPK Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	45.048.000	0
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	79.139.150.000	82.866.072.000	-3.726.922.000
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	69.510.293.000	70.883.312.000	-1.373.019.000
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	699.533.000	828.643.000	-129.110.000
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	1.017.117.000	1.446.943.000	-429.826.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	261.487.658.000	207.698.963.000	53.788.695.000
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	72.972.339.000	64.550.992.000	8.421.347.000
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	66.290.000	81.908.000	-15.618.000
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	22.439.000	22.439.000	0
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	182.514.000	97.114.000	85.400.000
	Total	**485.142.381.000**	**428.521.434.000**	**56.620.947.000**

D. Penetapan Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanaah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1. Peta Strategi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan oleh jajaran pimpinan, BPPK menetapkan peta strategi tahun 2022 yaitu sebanyak 11 SS.

Gambar 2.1 berikut adalah peta strategi BPPK tahun 2022.

2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja organisasi, maka sesuai dengan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 ditetapkanlah IKU. Adapun jumlah keseluruhan IKU BPPK tahun 2022 adalah sebanyak 22 IKU.

Tabel-tabel berikut menjelaskan perbandingan antara SS dan IKU masing-masing perspektif tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Stakeholder Perspective

	Tahun 2021			Tahun 2022	
1	**Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal**		**1**	**SDM Pengelolaan Keuangan Negara yang Kompeten**	
1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	77 (skala 100)	1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	85 (skala 100)
			1b-CP	Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi	80
1b-CP	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	80%	1c-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	82%

Gambar 2.1: Peta Strategi BPPK Tahun 2022

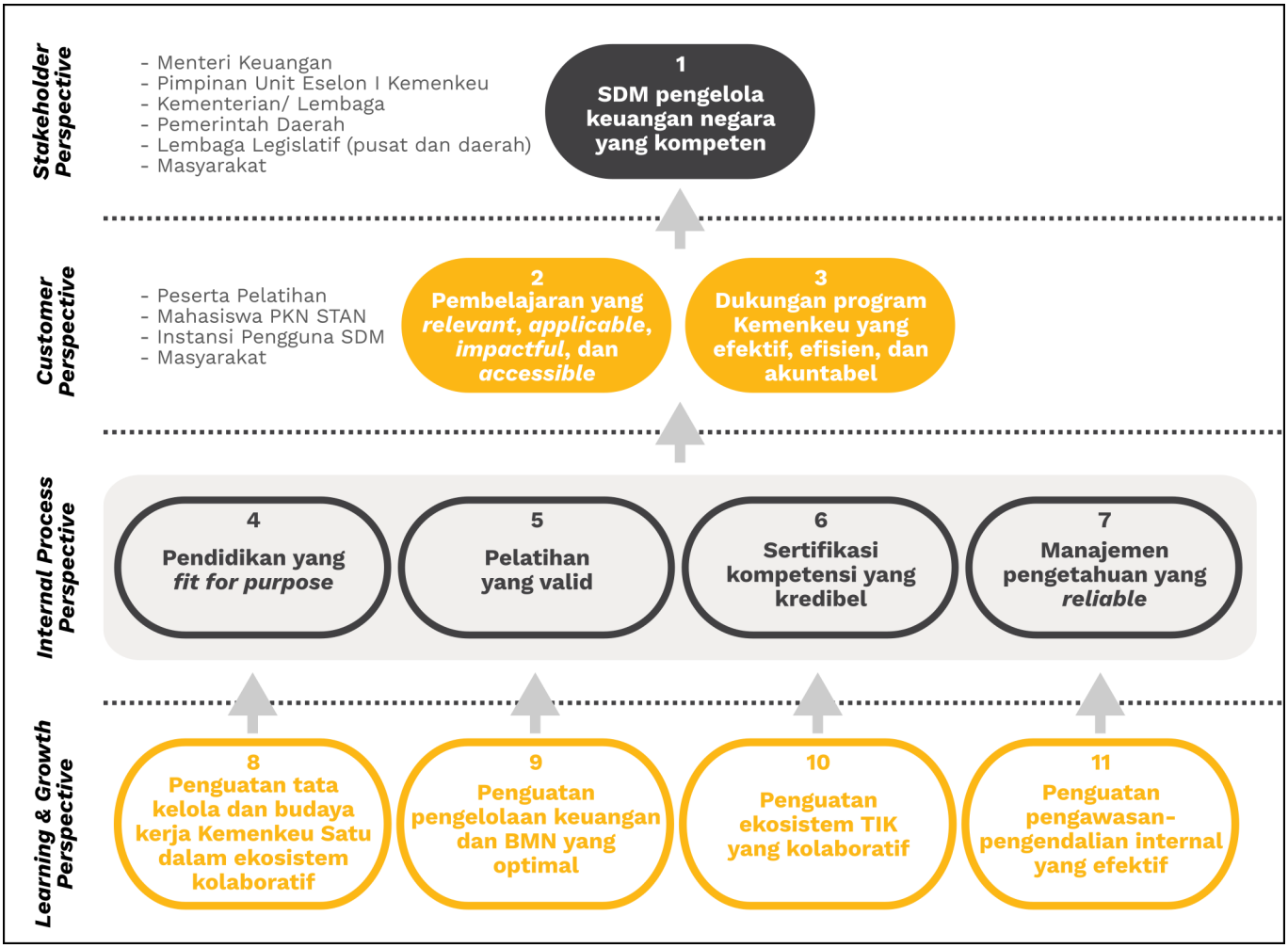

Customer Perspective

	Tahun 2021			Tahun 2022	
2	**Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal**		**2**	**Pembelajaran yang *Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible***	
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	84%	2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	85%
			3	**Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel**	
			3a-CP	Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati	70
			3b-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85
2b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41 (skala 5)	3c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,45

Internal Process Perspective

	Tahun 2021			Tahun 2022	
3	**Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal**		**4**	**Pendidikan yang *Fit for Purpose***	
3a-N	Indeks Kualitas Penelitian	193	4a-N	Indeks Kualitas Penelitian	335
3b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	75%	4b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	80%
4	**Pembelajaran Berdampak Tinggi**		**5**	**Pelatihan yang Valid**	
4a-N	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%			
4b-N	Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	70%			

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

	Tahun 2021			Tahun 2022	
4c-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran	100	5a-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4
			5b-N	Tingkat Validasi Program Pembelajaran	100
6	**Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas**		**7**	**Manajemen Pengetahuan yang *Reliable***	
6a-N	Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	7a-N	Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%
			7b-N	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	3
5	**Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan**		**6**	**Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel**	
5a-N	Persentase Kualitas Program Sertifikasi	80%	6a-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	85%

Learning and Growth Perspective

	Tahun 2021			Tahun 2022	
7	**Organisasi dan SDM yang Optimal**		**8**	**Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif**	
7a-CP	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	96,1%			
7b-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,05			
7b1-CP	Indeks Integritas	90,1			
7b2-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK	100%			
			8a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100
7c-CP	Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*	87,5%	8b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tahun 2021			Tahun 2022		
			8c-CP	Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	100
			8d-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
8	**Pengelolaan Keuangan yang Optimal**		**9**	**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif**	
8a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	89,5%			
8b-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	90	9a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100
8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%			
			9b-CP	Tingkat Penggunaan Aset Bersama	25
9	**Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal**		**10**	**Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif**	
9a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,55 (skala 4)			
9b-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	87	10a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100
			11	**Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**	
			11a-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,3

3. Inisiatif Strategis

Selain 22 IKU yang diukur, tahun 2022 BPPK memiliki Inisiatif Strategis (IS). IS merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.

Tabel 2.6 berikut menyandingkan IS BPPK tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6: Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK

Tahun	SS/ IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	Biaya
2021	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara	300.000 jamlator (10.000 peserta)	501.375.000
2021	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	*Digital Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara	90.000 jamlator (6.000 peserta)	304.475.000
2022	SDM Pengelola Keuangan Negar yang Kompeten/ Tingkat Implementasi *Learning Organization*	Penguatan Implementasi Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran Terintegrasi untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan Sebagai *Learning Organization*	Terwujudnya Kemenkeu sebagai *learning organization* dengan tingkat implementasi tinggi (80%)	-

BAB 3 | Akuntabilitas Kinerja

A	Capaian Renstra	33
B	Capaian Kinerja Organisasi	35
C	Realisasi Anggaran	90
D	Realisasi *Output*	94
E	Kinerja Lain-Lain	98

Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.

BAB 3 | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra

Capaian renstra BPPK tahun 2022 berikut tahun sebelumnya tergambar pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1: Capaian Renstra BPPK Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	93%	99,94%	93%	96,12%
2	Indeks kualitas penelitian	148	442	193	546,50
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	75%	81,47%	80%	99,41
4	Tingkat implementasi *learning organization*	77%	93,2	80%	91,01
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%	89,9%	82%	88,78%
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%	98,37%	85%	98,85%
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	98,21%	-	-
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	-
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	99,43%	70%	94,88%
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	5,2%	4,5%	7,0227%
11	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%	98,8%	80%	99,32%
12	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	116%	100%	115,29%
13	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	2	4

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
14	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai	0,25%	1,6%	0,25%	1,7209%
15	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ	94%	115,56%	94%	99,46%
16	Persentase kualitas pengelolaan BLU	80%	78,11%	80%	120,00%
17	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	87%	100%	90%	100,00%

Dari **Tabel 3.1** di atas terlihat bahwa indikator kinerja "Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik" tidak memiliki target pada tahun 2022. Akan tetapi apabila dihitung, indikator kinerja tersebut pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 96,90%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 98,21%, realisasi tersebut sedikit mengalami penurunan.

Sementara itu indikator kinerja "Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI" mulai tahun 2022 memiliki target setelah tahun-tahun sebelumnya tidak memiliki target kinerja. Meskipun demikian indikator tersebut pada tahun 2022 belum dapat dihitung.

Adapun indikator kinerja "Tingkat kematangan *Knowledge Management*" mulai tahun 2022 memiliki target kinerja setelah tahun-tahun sebelumnya tidak memiliki target kinerja. Indikator kinerja ini sudah bisa dihitung dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 4.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsinya secara proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BPPK periode Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh hasil bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK periode Tahun 2022 adalah sebesar **113,20**.

Perkembangan NKO BPPK dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tergambar pada **Gambar 3.1** berikut. Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.1** tersebut, dari tahun 2018 s.d. 2022 NKO BPPK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi NKO BPPK kembali meningkat pada tahun 2020 dan seterusnya.

Gambar 3.1: Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK

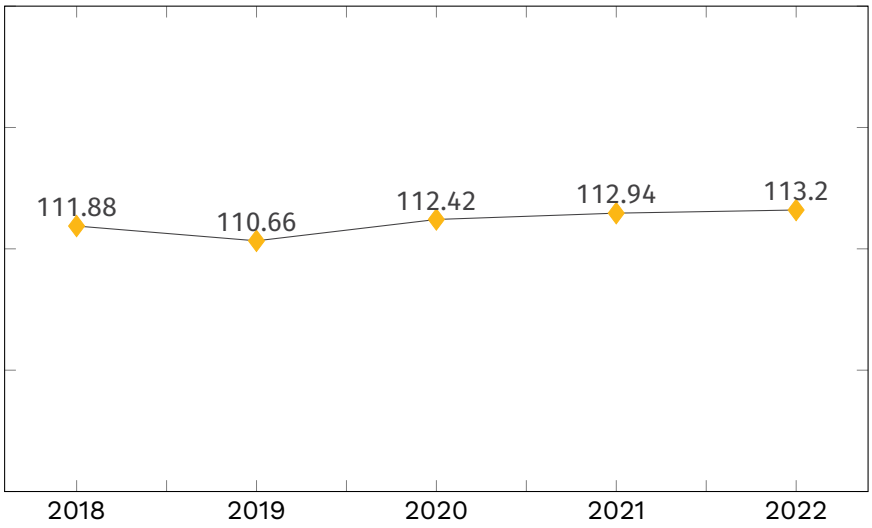

Sepanjang tahun 2022, dari 22 IKU yang dimiliki BPPK semuanya berstatus hijau (memenuhi target/ ekspektasi). Capaian dari keseluruhan 22 IKU tersebut ditunjukkan pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2: Target, Realisasi, dan Capaian IKU BPPK Tahun 2022

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU (bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
A	***Stakeholder Perspective (30%)***			***107,96***
1	**SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten**			**107,96**
1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	85 (skala 100)	91,01	107,07
1b-CP	Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi	80	86,84	108,51

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU (bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	
1c-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	82%	88,78%	108,27	
B	***Customer Perspective (20%)***			***111,81***	
2	**Pembelajaran yang *Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible***			**116,29**	
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	85%	98,85%	116,29	
3	**Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel**			**107,33**	
3a-CP	Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati	70	94,05%	120,00	
3b-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85	88,69	104,34	
3c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,45	4,8	100,22	
C	***Internal Process Perspective (25%)***			***118,62***	
4	**Pendidikan yang *Fit for Purpose***			**120,00**	
4a-N	Indeks Kualitas Penelitian	335	546,5	120,00	
4b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	80%	99,41	120,00	
5	**Pelatihan yang Valid**			**120,00**	
5a-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4	5	120,00	
5b-N	Tingkat Validasi Program Pembelajaran	100	120	120,00	
6	**Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel**			**116,85**	
6a-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	85%	99,32%	116,85	
7	**Manajemen Pengetahuan yang *Reliable***			**117,65**	
7a-N	Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	115,29%	115,29	
7b-N	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	3	4	120,00	
D	***Learning and Growth Perspective (25%)***			***112,82***	
8	**Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif**			**112,28**	
8a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100	115,13	115,13	
8b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	94,60%	102,83	
8c-CP	Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	100	120	120,00	
8d-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,91	110,14	
9	**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif**			**116,39**	

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU (bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
9a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100	112,78	112,78
9b-CP	Tingkat Penggunaan Aset Bersama	25	110%	120,00
10	**Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif**			**109,31**
10a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100	109,31	109,31
11	**Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**			**113,29**
11a-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,3	107,97	113,29
	Nilai Kinerja Organisasi			**113,20**

Berikut adalah penjelasan capaian IKU untuk masing-masing SS.

SS-1. SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten

SDM pengelola keuangan negara yang kompeten adalah SDM yang cakap dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis (SS) ini, BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	85 (skala 100)	91,01	107,07
1b-CP	Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi	80	86,84	108,51
1c-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	82%	88,78%	108,27

Indeks capaian untuk SS ini adalah **107,96**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten” ini adalah sebagai berikut.

1a-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tingkat implementasi *learning organization* (LO) merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus-menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *learning organization* ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajara (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat implementasi *learning organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kementerian Keuangan *corporate university*. Tingkat implementasi *learning organization* ini dapat ditinjau dari *input*, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian sebagai berikut.

a. *Strategic fit and management commitment*;
b. *Learning function organization*;
c. *Learning spaces*;
d. *Learning solutions*;
e. *Leaders as teachers*;
f. *Learners*;
g. *Knowledge management implementation*;
h. *Feedback*;
i. *Learning value chain*;
j. *Learners performance*.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari tiga metode, antara lain:

a. Hasil survei oleh tim survei (bobot penilaian 30%). Adapun tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei. Adapun responden survei adalah seluruh pegawai pada sekretariat unit eselon I dan unit kerja yang menjadi sampel.
b. Hasil *self assessment* (bobot penilaian 30%). *Self assessment* ini dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap unit eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
c. Hasil penilaian komite (bobot penilaian 40%). Komite penilaian adalah BPPK dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan pusdiklat-pusdiklat.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1a-CP	SS: SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten							
	IKU: Tingkat Implementasi *Learning Organization*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	Max/TLKV
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	91,01	91,01	
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	107,07	107,07	

Adapun tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2022 ini antara lain:

a. Melakukan permintaan *longlist* unit sampel *learning organization* tahun 2022 tingkat Kementerian Keuangan.
b. Melakukan koordinasi penyampaian usulan unit sampel penilaian tingkat implementasi *learning organization* tahun 2022 di lingkungan BPPK.
c. Melakukan rapat koordinasi pengelola *learning organization* pusdiklat.
d. Melakukan analisis laporan pengukuran LO tahun 2021.
e. Melakukan rapat koordinasi pengelolaan organisasi pembelajar dan manajemen pengetahuan dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPPK.
f. Melakukan koordinasi penyusunan/ harmonisasi rencana kerja implementasi LOKM unit kerja di lingkungan BPPK.
g. Koordinasi pembentukan pengelola LOKM unit kerja serta tingkat EseloN I.
h. Menerbitkan Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-1/PP/2022 tntang Penyediaan Kesempatan Pegawai dalam Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan BPPK sebagai salah satu tindak lanjut hasil pengukuran LO tahun 2021 serta dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa organisasi memberikan kesempatan kepada pegawai dalam kegiatan pembelajarannya.
i. Melaksanakan *one-on-one meeting* pengelolaan LOKM dengan seluruh pengelola LOKM unit kerja di lingkungan BPPK.
j. Membentuk grup komunikasi pengelola LOKM dan grup LO Unit Sampel sebagai sarana koordinasi terkait implementasi LOKM.
k. Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPPK yang telah ditetapkan sebagai unit sampel serta *sharing knowledge* dan *experience* proses pengukuran LO unit sampel tahun 2022 dengan unit sampel tahun 2021.
l. Menyampaikan data responden survei LO tahun 2022 dari seluruh unit sampel.
m. Melakukan koordinasi pengumpulan bukti dukung dan kertas kerja pengukuran *self-assessment* dengan menggunakan metode pengukuran tahun 2022.
n. Mengadakan rapat koordinasi progres pengisian bukti dukung *self-assessment* dan strategi survei LO tahun 2022.
o. Menyelesaikan pengukuran implementasi LO untuk *self-assessment* dan survei LO.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
77	93,2	80%	85 (skala 100)	91,01

Capaian IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*" pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian IKU periode tahun 2020 dan tahun 2021. Pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 capaian IKU ini adalah sebesar 120, sedangkan pada periode tahun 2022 capaian IKU hanya sebesar 107,07. Penurunan capaian IKU ini disebabkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penetapan target IKU melebihi target pada Renstra BPPK. Mempertimbangkan capaian IKU ini pada periode tahun 2020 dan tahun 2021, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan optimis untuk menetapkan target IKU melebihi target yang tercantum dalam Renstra. Tahun 2022 target IKU adalah sebesar 85, sedangkan target pada Renstra adalah sebesar 80.
b. Adanya perubahan mekanisme pengukuran tingkat implementasi LO pada tahun 2022 yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.11/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) dan Komite *Learning Organization* di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perubahan tersebut mencakup antara lain perubahan indikator, penajaman formula, penambahan metode pengukuran, dan penajaman pertanyaan survei.

Nilai tingkat implementasi LO yang diraih oleh BPPK pada tahun 2022 adalah sebesar 92,97. Nilai sebesar itu lebih tinggi dibandingkan nilai implementasi LO tingkat Kementerian Keuangan yang hanya sebesar 91,01. Dibandingkan dengan unit-unit eselon I lain, BPPK menduduki urutan ke-6 dari 12 unit eselon I/non-eselon I.

Perincian realisasi implementasi LO unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3: Perincian Nilai Tingkat Implementasi LO se-Kementerian Keuangan

No	Unit	Nilai
1	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	96,60
2	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	95,41
3	Sekretariat Jenderal	93,65
4	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	93,46
5	Direktorat Jenderal Anggaran	93,43
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	92,97
7	Direktorat Jenderal Pajak	91,55
8	Badan Kebijakan Fiskal	88,86
9	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	87,32
10	Inspektorat Jenderal	86,95
11	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	85,73
12	Lembaga National Single Window	85,27
	Kemenkeu	**91,01**

Sementara itu, rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan pada periode-periode berikutnya antara lain:

a. Implementasi LO di BPPK tahun 2023.
b. Asistensi implementasi LO seluruh unit eselon I tahun 2023.
c. Pengukuran tingkat implementasi LO tahun 2023.

1b-CP Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi

Model pembelajaran terintegrasi merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengombinasikan model belajar mandiri (*self learning*), pembelajaran terstruktur (*structured learning*), belajar di lingkungan sosial atau belajar dari orang lain (*social learning/ learning from others*), dan/atau pembelajaran praktik di tempat kerja (*learning from experience/ learning while working*), yang dikelola secara sistematis serta didukung dengan manajemen pengetahuan. Pembelajaran terintegrasi merupakan implementasi LO. Adapun setiap pimpinan di Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan akses dan kesempatan belajar kepada pegawai, khususnya dalam memfasilitasi pengelolaan pembelajaran melalui kombinasi model pembelajaran terintegrasi di unit yang dipimpinnya sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran terintegrasi membuka luas akses pengembangan kompetensi, sehingga unit eselon I dan pegawai akan semakin mudah dalam melaksanakan pengembangan kompetensi.

Penyusunan dan pengembangan desain dan materi pembelajaran terintegasi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengelola (BPPK). Kedua, program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengguna (unit eselon I). Program pembelajaran terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengelola dapat mengintegrasikan metode pembelajaran terintegrasi. Sedangkan program pembelajaran terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengguna menekankan pada pembelajaran mandiri pegawai, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja.

Berdasarkan hasil AKP tahun 2022, terdapat 182 program pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan oleh unit eselon I/non-eselon I. Adapun sebaran program per unit beserta target implementasi program pembelajaran terintegrasi tercantum dalam **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4: Sebaran Program Kebutuhan dan Target Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Tahun 2022

No	Unit	Kebutuhan	Target
1	Sekretariat Jenderal	13	3
2	Inspektorat Jenderal	10	2
3	Direktorat Jenderal Anggaran	13	3
4	Direktorat Jenderal Pajak	19	4
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	31	5
6	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	9	2
7	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	19	4
8	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	18	4
9	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1
10	Badan Kebijakan Fiskal	12	3
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	18	4
12	Lembaga National Single Window	16	4
	Kemenkeu	**182**	**39**

Tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi menggunakan formula pengukuran melalui penyelesaian program pembelajaran yang didesain, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama antara BPPK dan unit penggunanya.

BPPK sebagai unit pengelola diukur dengan indikator sebagai berikut.

a. Penyediaan kurikulum pembelajaran;
b. Penyediaan materi dan media pembelajaran;
c. Penyediaan tenaga pengajar;
d. Penyelenggaraan pembelajaran;
e. Pengelolaan *action learning*;
f. Pengelolaan manajemen pengetahuan; dan

g. Pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran.

Sementara itu BPPK sebagai unit pengguna (termasuk juga unit-unit eselon I/non-eselon I lain) diukur dengan indikator sebagai berikut.

a. Keterlibatan dalam proses perancangan dan/atau pengembangan program;
b. Keterlibatan dalam proses penyusunan dan/atau pengembangan materi pembelajaran;
c. Penyediaan desain dan materi pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1;
d. Penyelenggaraan pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1;
e. Ketepatan pengiriman peserta;
f. Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar;
g. Dukungan dalam pelaksanaan *action learning*;
h. Dukungan dalam pendokumentasian dan pemanfaatan hasil pembelajaran; dan
i. Dukungan dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1b-CP	SS: SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten							
	IKU: Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	80	80	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	86,84	86,84	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	108,51	108,51	

BPPK tidak menemukan masalah yang menghambat dalam memperoleh realisasi IKU "Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi" ini sepanjang tahun 2022. Adapun sepanjang periode Tahun 2022 ini tindakan-tindakan yang telah dilakukan terkait pencapaian IKU ini antara lain sebagai berikut.

a. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
b. Telah selesai disusun instrumen penilaian pembelajaran terintegrasi.
c. Telah selesai dilakukan *self assessment* pembelajaran terintegrasi oleh unit eselon I, penilaian unit eselon I oleh pusdiklat mitra, dan SA pusdiklat sebagai pengelola.
d. Telah disampaikan Laporan Implementasi LO dan Pembelajaran Terintegrasi.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Implementasi pembelajaran terintegrasi tahun 2023.
b. Pengukuran tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	80	86,84

IKU “Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi” ini tidak tercantum dalam Renstra BPPK 2020-2024 maupun Renja BPPK Tahun 2022. IKU ini baru ditargetkan sejak tahun 2022 dan diproyeksikan akan berlanjut hingga tahun 2024 dengan target yang semakin meningkat.

Nilai tingkat implementasi yang diraih oleh BPPK pada tahun 2022 adalah sebesar 86,84. Nilai sebesar itu merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan unit-unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun perincian realisasi implementasi pembelajaran terintegrasi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan tercantum dalam **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3.5: Perincian Nilai Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi se-Kementerian Keuangan

No	Unit	Nilai
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	86,84
2	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	85,71
3	Direktorat Jenderal Anggaran	85,57
4	Sekretariat Jenderal	85,14
5	Badan Kebijakan Fiskal	84,71
6	Direktorat Jenderal Pajak	84,57
7	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	84,29
8	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	84,00
9	Inspektorat Jenderal	83,71
10	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	83,57
11	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	83,29
12	Lembaga National Single Window	*N/A*
	Kemenkeu	**84,67**

1c-N Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Adapun bentuknya adalah berupa evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4 (dampak pelatihan). Sementara itu evaluasi pembelajaran Kirkpatrick memiliki empat level, yaitu

- Level 1: mengukur reaksi peserta terhadap pelatihan yang diikuti.
- Level 2: mengukur tingkat pengetahuan yang didapat peserta pelatihan, pengukuran dilakukan melalui ujian atau *pre-test* dan *post-test*.
- Level 3: mengukur perubahan perilaku melalui implementasi pengetahuan di tempat kerja.
- Level 4: mengukur pencapaian hasil berupa peningkatan kinerja peserta pelatihan.

Pengukuran evaluasi level 4 (evaluasi pascapembelajaran level 4) ini dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian *leading indicator, desired result*, isolasi/ *group control*, *trend lines*, dan penilaian dari atasan. Evaluasi level 4 ini dilakukan setelah tiga s.d. lima bulan semenjak pegawai selesai mengikuti pelatihan.

Pemilihan objek pelatihan dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep renstra masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama. Adapun alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan level 4. Alumni pelatihan juga merupakan alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi Kirkpatrick sampai dengan level 3. Alumni pelatihan yang diukur harus pula memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Adapun formula untuk menghitung capaian kinerja atas IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya" ini tertera dalam **Rumus 3.1** berikut.

Rumus 3.1: Formula Penghitungan Realisasi IKU

$$Realisasi = (50\% \times Komponen\ A) + (30\% \times Komponen\ B) + (20\% \times Komponen\ C)$$

Keterangan untuk formula di atas adalah sebagai berikut. Komponen A adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan subjek yang dievaluasi level 4. Adapun Komponen B adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan dengan subjek yang dievaluasi level 3). Sedangkan Komponen C adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan subjek yang lulus evaluasi level 2.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1c-N	SS: SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten							
	IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	82%	82%	82%	82%	82%	82%	
Realisasi	*N/A*	90,28%	90,28%	90,46%	90,46%	88,78%	88,78%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	110,10	110,10	110,32	110,32	108,27	108,27	

Pada tahun 2022, terdapat 12 program pelatihan yang direncanakan akan dilakukan evaluasi pascapembelajaran s.d. level 4, antara lain:

a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Pusdiklat KM);
b. Pelatihan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (Pusdiklat AP);
c. Pelatihan Renggar Kepala Subbagian umum (Pusdiklat AP);
d. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Sistem Informasi Geografis (Pusdiklat Pajak);
e. PJJ Penguasaan Wilayan Dengan Optimalisasi Media Internet (Pusdiklat Pajak);
f. PJJ Asisten Penyuluh (Pusdiklat Pajak);
g. PJJ Manajemen Mutu dan Keselamatan Kerja Laboratorium Pengujian Bea dan Cukai Standar ISO 17025:2017 (Pusdiklat BC);
h. PJJ Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (Pusdiklat BC);
i. PJJ Pejabat Lelang bagi Pejabat Struktural DJKN TahuN 2021 (Pusdiklat KNPK);
j. PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Angkatan II Tahun 2021 (Pusdiklat KNPK);
k. PJJ Penilaian Tanah dengan Karakteristik Khusus dan Tanah Koridor Tahun 2021 (Pusdiklat KNPK); dan
l. PJJ Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Tahun 2022 (Pusdiklat KNPK).

Sepanjang tahun 2022 ini tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir periode Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut,

a. Menyelenggarakan pelatihan pada semester II tahun 2021 yang akan dilakukan pengukuran evaluasi pascapembelajaran s.d. level 4 pada periode semester I tahun 2022.
b. Melakukan pengukuran evaluasi level 4 pada seluruh pusdiklat dengan realisasi sebesar 88,78% (Komponen A: 95,02% [630/663], Komponen B: 87,62% [630/719], Komponen C: 74,91% [630/841]).

Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilakukan pada periode berikutnya:

a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).
b. Penyusunan program pembelajaran.
c. Penyusunan desain dan *development* pembelajaran konvensional dan digital.
d. Penyelenggaraan pembelajaran.
e. Pengukuran dampak pembelajaran (evaluasi Kirkpatrick level 1 s.d. 3).

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
80%	89,34%	82%	82%	88,78%

SS-2. Pembelajaran yang *Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible*

Pembelajaran yang *relevant*, *applicable*, *impactful*, dan *accessible* adalah pengembangan kompetensi pegawai yang sealras dengan kriteria pembelajaran *corporate university* yang mengedepankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* (*relevant*), dapat diterapkan (*applicable*), memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (*impactful*), serta mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja (*accessible*) sehingga tercipta *link and match* antara pembelajaran dengan kinerja organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	85%	98,85%	116,29

Indeks capaian untuk SS ini adalah **116,29**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Pembelajaran yang *Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible*" ini adalah sebagai berikut.

2a-N Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya

Berbeda dengan IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya" yang merupakan bentuk evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4, IKU ini merupakan bentuk evaluasi Kirkpatrick level 3 (*behaviour*). Adapun tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran (EIHP) atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh pusdiklat serta disepakati oleh unit pengguna.

Program pelatihan yang akan dievaluasi ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan desain pembelajaran. Responden dalam kegiatan EIHP adalah alumni, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360 derajat. Adapun responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360 derajat adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap

diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan.

Adapun formula pengukuran IKU ini tertera dalam **Rumus 3.2** berikut.

Rumus 3.2: Formula Penghitungan IKU

$$Kualitas\ Perilaku\ Kerja\ Alumni\ X = Rata - rata\ dari \begin{pmatrix} Rata - rata\ dari\ A \\ Rata - rata\ dari\ B \\ Rata - rata\ dari\ C \\ Rata - rata\ dari\ D \end{pmatrix}$$

$$Realisasi = \frac{E}{F} \times 100\%$$

A adalah jawaban alumni X, B adalah jawaban atasan alumni X, C adalah jawaban rekan kerja alumni X, dan D adalah jawaban bawahan alumni X. Sedangkan E adalah jumlah alumni pelatihan yang mengalami peningkatan kualitas perilaku kerja dan F adalah jumlah alumni pelatihan yang diukur dalam EIHP.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

2a-N	SS: Pembelajaran yang *Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible*							
	IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Realisasi	*N/A*	98,38%	98,38%	98,38%	98,38%	98,85%	98,85%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	115,74	115,74	115,74	115,74	116,29	116,29	

Pada tahun 2022 terdapat 55 program pelatihan yang dilakukan evaluasi pascapembelajaran sampai dengan level 3, termasuk yang dilakukan evaluasi pascapembelajaran level 4. Adapun sebaran program pelatihan tersebut antara lain:

a. Pusdiklat KM sebanyak 17 program;
b. Pusdiklat AP sebanyak 8 program;
c. Pusdiklat Pajak sebanyak 3 program;
d. Pusdiklat BC sebanyak 7 program;
e. Pusdiklat KNPK sebanyak 10 program; dan

f. Pusdiklat KU sebanyak 10 program.

Sepanjang periode Tahun 2022 ini tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

a. Telah diselenggarakan pelatihan pada semester kedua tahun 2021 yang akan dilakukan pengukuran evaluasi pascapembelajaran s.d. level 3 pada periode semester pertama tahun 2022 ini.
b. Sampai dengan akhir periode Tahun 2022 telah dilakukan pengukuran evaluasi pascapembelajaran level 3 pada seluruh pusdiklat dengan total 55 pelatihan.
c. Terdapat 4.212 alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya dari total 4.261 alumni yang diukur peningkatan kualitas perilaku kerjanya (98,85%).

Sementara itu rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Pelaksanaan AKP;
b. Penyusunan program pembelajaran;
c. Penyusunan desain dan *development* pembelajaran konvensional dan digital;
d. Penyelenggaraan pelatihan; dan
e. Pengukuran dampak pembelajaran (evaluasi level 1 s.d. 3).

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
84%	98,37%	85%	85%	98,85%

SS-3. Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Dukungan program Kementerian Keuangan dilakukan untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau *stakeholders* yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasarkan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakukan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan kusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati	70	94,05%	120,00
3b-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85	88,69	104,34
3c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,45	4,8	100,22

Indeks capaian untuk SS ini adalah **107,33**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel" ini adalah sebagai berikut.

3a-CP Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati

G20 (*The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors*) adalah kelompok yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa yang membahas isu-isu utama terkait ekonomi global, seperti stabilitas keuangan internasional, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Tahun 2022 Indonesia dipercaya untuk memegang Presidensi G20 selama satu tahun.

IKU ini mengukur realisasi *communique* atau kesepakatan final atas aksi/kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat *Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG) dalam forum G20. FMCBG merupakan pertemuan penting yang dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari anggota G20. FMCBG membahas berbagai agenda penting di sektor keuangan dunia, di antaranya terkait ekonomi global, arsitektur keuangan internaisonal, peraturan sektor keuangan, investasi infrastruktur, keuangan berkelanjutan, dan perpajakan berkelanjutan. Sebagai pemegang kekuatan ekonomi mayoritas dunia, *communique* yang dihasilkan dalam FMCBG tentunya akan berdampak luas terhadap ekonomi global.

Kementerian Keuangan ingin memberikan kontribusi terbaiknya dalam FMCBG tersebut dengan memberikan berbagai usulan *communique*. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan menetapkan persentase *communique* G20 usulan Indonesia yang disepakati sebagai salah satu IKU di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut atas definisi IKU ini adalah sebagai berikut.

a. *Communique* G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/ kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/ rumusan *communique* hasil pembahasan *deputy meeting*.
b. Disepakati artinya kalimat/ kata kunci yang diusulkan dalam *Communique* G230 usulan Indonesia disetujui dalam rapat FMCBG.

Adapun IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kesepakatan *communique* G-20.

Sementara itu formula untuk menghitung realisasi kinerja atas IKU "Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati" tertera pada **Rumus 3.3** berikut.

Rumus 3.3: Formula Penghitungan Realisasi IKU

$$Realisasi = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

Keterangan **Rumus 3.3** adalah sebagai berikut. A adalah jumlah kata kunci yang disepakati setelah pembahasan *deputy meeting*. B adalah jumlah kata kunci yang diusulkan dalam *communique* sebelum pembahasan *deputy meeting*.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

3a-CP	SS: Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70	70	
Realisasi	90,58%	90,58%	90,58%	90,58%	90,58%	94,05%	94,05%	Max/TLKV
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Dalam pencapaian IKU tersebut, terdapat beberapa isu utama sebagai berikut.

a. Beberapa anggota bersikeras pada posisi yang didorong oleh sentimen politik, terutama Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia.
b. Anggota negara-negara Eropa sangat solid dalam mendukung posisi satu negara dan negara lainnya.
c. Pada isu-isu yang menjadi kepentingan Kepresidenan, penting untuk memastikan dukungan dari anggota lain karena Kepresidenan tidak dapat mempertahankan posisi sendiri selama negosiasi.

Dari total 308 kata kunci yang diusulkan Indonesia, terdapat 279 kata kunci yang disepakati dalam FMCBG Meeting yang pertama. Dengan demikian capaian IKU ini untuk periode Tahun 2022 adalah 90,58%.

Dalam mencapai realiasi IKU ini, beberapa tindakan telah dilaksanakan, antara lain:

a. Melakukan *mapping* negara dalam kategori wajib negosiasi serta *monitoring* kondisi global.

b. Penyampaian rencana kerja G20 di bawah Presidensi Indonesia, termasuk rencana kerja *working group* dan *workstream* pada *finance track*.
c. Pembahasan substansi pada tingkat yang lebih teknis, yaitu di pertemuan tingkat *working group* dan *workstream*: 1st IFAWG, JFHTF, FWG, IWG, SFWG, dan 2nd IWG, JFHTF.
d. Konsultasi naskah *communique* dengan Troika (melalui pertemuan) dan *Co-chairs* (melalui email):
    - Penyampaian draf *communique* ke *Principals*;
    - Pembahasan *communique* dalam Pertemuan Troika dan secara simultan dikirimkan ke Sherpa Indonesia;
    - Penyampaian *communique* kepada *Member* dan *IOs* dalam selama dua kali putaran untuk mendapat tanggapan;
    - Distribusi *final draft* kepada *Members*.
e. Melakukan konsultasi terpisah secara bilateral untuk beberapa isu.

Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yaitu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Upaya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait kesepakatan dalam tiga agenda prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

a. Terkait transisi energi berkelanjutan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk Indonesia senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Inisiatif ini ditindaklanjuti dengan *Energy Transition Mechanism* (ETM) *Country Platform* yang saat ini sudah mendapat komitmen sebesar 500 juta dolar AS. Dana ini akan menggeraklan lebih dari empat miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.
b. Terkait transformasi digital, pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.
c. Terkait arsitektur kesehatan global, KTT G20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (*pandemic fund*) senilai 1,5 miliar dolar AS. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan menyampaikan proposal penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia melainkan juga untuk kerja sama antarnegara.

IKU "Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati" ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data histori realisasi. Selain itu, IKU ini tidak tercantum dalam Renstra BPPK 2020-2024 maupun Renja BPPK Tahun 2022. Hal ini karena IKU ini hanya ditargetkan pada tahun 2022 saat Indonesia memegang Presidensi G20.

3b-CP Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian reformasi birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRBmelalui dua buah komponen, yaitu komponen pemenuhan dan komponen *reform*. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam komponen tersebut adalah sebagai berikut.

a. Proses (dengan bobot nilai 60%), terdiri atas:
   - Manajemen perubahan;
   - Deregulasi kebijakan;
   - Penataan dan penguatan organisasi;
   - Penataan tata laksana;
   - Penataan sistem manajemen SDM;
   - Penguatan akuntabilitas;
   - Penguatan pengawasan; dan
   - Penguatan kualitas pelayanan publik.

b. Hasil (dengan bobot nilai 40%), terdiri atas:
   - Kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
   - Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan
   - Kualitas pelayanan publik.

Ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh KemenPANRB dengan tujuh kategori penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.6: Kategori Penilaian Ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai (Angka)	Interpretasi
1	AA	>90–100	Istimewa
2	A	>80–90	Memuaskan
3	BB	>70–80	Sangat Baik
4	B	>60–70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50–60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30–50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0–30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

3b-CP	SS: Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	85	85	85	85	85	85	
Realisasi	*N/A*	88,69	88,69	88,69	88,69	88,69	88,69	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	104,34	

Berikut adalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IKU ini.

a. Koordinasi pengumpulan data untuk dasar pengisian LKE BPPK.
b. Rapat dan *workshop* tentang pengisian LKE.
c. Rapat bedah LKE bersama Inspektorat Jenderal dan CTO.
d. Telah dibentuk tim pengumpulan data LKE BPPK (Surat Tugas Sekretaris BPPK Nomor ST-312/PP.1/2022 tanggal 7 April 2022).
e. Pengisian LKE telah selesai dilaksanakan dan dikirimkan ke Kementerian PANRB.
f. Telah dilakukan proses penilaian oleh Kementerian PANRB.
g. Telah dilakukan pendalaman PMPRB pada 29 September 2022.

IKU "Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi" ini mulai diimplementasikan di lingkungan BPPK tahun 2022. IKU ini tidak tercantum dalam Renstra BPPK 2020-2024 maupun Renja BPPK Tahun 2022. Akan tetapi IKU ini tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 dan akan diimplementasikan kembali di tahun 2023. Oleh sebab itu, sebagai rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode-periode berikutnya, BPPK akan mengoordinasikan kembali penilaian PMPRB tahun 2023 bagi organisasi di lingkungan BPPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut. Sebagai catatan, target IKU ini pada Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 adalah 80,3.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	85	88,69

3c-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* terhadap layanan Kementerian Keuangan. Adapun tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* lainnya adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan (SKPL).

Kegiatan yang direncanakan akan disurvei tahun 2022 antara lain:

a. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ);
b. Pelatihan *E-learning*;
c. Seleksi beasiswa pascasarjana; dan
d. Seleksi penerimaan mahasiswa PKN STAN.

Data capaian IKU ini diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan bekerja sama dengan tim peneliti independen dengan *output* berupa Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan. Lingkup survei tersebut adalah pengguna layanan atau *stakeholders* dan jenis layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

3c-N	SS: Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	IKU: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	4,45	4,45	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	4,8	4,8	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	100,22	100,22	

IKU “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan” ini mengalami perubahan target tahunan dari 4,36 menjadi 4,57. Perubahan tersebut dilakukan agar target selaras dengan hasil pembahasan rapat pimpinan *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2022 pada 8 April 2022. Adapun adendum perjanjian kinerja terkait perubahan target ini terdapat dalam lampiran.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut.

a. Telah dilakukannya pembahasan hasil SKPL tahun 2021 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan SKPL tahun 2022.
b. Telah disusun *longlist* responden survei dan disampaikan ke Sekretariat Jenderal.
c. Telah diselesaikan survei. Adapun pengumpulan data survei telah tuntas dilakukan pada September 2022 untuk kemudian diolah.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKPL tahun 2022.
b. Pemberian layanan tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	**Realisasi 2021**	**Target Renstra**	**Target 2022**	**Realisasi 2022**
4,41	4,63	-	4,45	4,8

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Pengguna Layanan (IKPL) BPPK mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun demikian, dari 11 unit eselon I dan non-unit

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, BPPK menduduki peringkat kedua perolehan IKPL tertinggi. Nilai IKPL BPPK pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKPL agregat Kementerian Keuangan yang sebesar 4,41. Perincian nilai IKPL unit-unit eselon I dan non-eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tercantum dalam **Tabel 3.7** berikut.

Tabel 3.7: Perincian IKPL Kementerian Keuangan Tahun 2022

No	Unit	Nilai 2022	Nilai 2021
1	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	4,61	4,59
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	4,58	4,63
3	Inspektorat Jenderal	4,55	4,59
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4,54	4,49
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	4,43	4,36
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	4,42	4,45
7	Sekretariat Jenderal	4,40	4,31
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4,39	4,31
9	Direktorat Jenderal Anggaran	4,34	4,40
10	Direktorat Jenderal Pajak	4,16	4,10
11	Lembaga National Single Window	4,11	4,17
	Kementerian Keuangan	**4,41**	**4,40**

SS-4. Pendidikan yang *Fit for Purpose*

Pendidikan yang *fit for purpose* adalah pengelolaan pendidikan vokasi yang sesuai dengan *tri dharma* perguruan tinggi, meliputi fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengelolaan beasiswa yang selaras dengan manajemen talenta, yang meliputi aspek seleksi dan penempatan studi serta pemanfaatan pascastudi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4a-N	Indeks Kualitas Penelitian	335	546,5	120,00
4b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	80%	99,41	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Pendidikan yang *Fit for Purpose*" ini adalah sebagai berikut.

4a-N Indeks Kualitas Penelitian

Riset atau penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas penelitian yang dihasilkan oleh PKN STAN dengan mempertimbangkan kualitas publikasinya. Indeks kualitas penelitian adalah nilai seluruh penelitian PKN STAN yang terpublikasi pada tahun 2022 berdasarkan bobot/ formula berikut.

- Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (Scopus, Thomson, Microsoft Academic Search), mendapatkan poin 7.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest, atau sejenisnya), mendapatkan poin 5.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti, mendapatkan poin 3.
- Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus, mendapatkan poin 2.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN, mendapatkan poin 1.
- Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal, mendapatkan poin 0,5.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

4a-N	SS: Pendidikan yang *Fit for Purpose*							
	IKU: Indeks Kualitas Penelitian							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	335	335	
Realisasi	*N/A*	152,5	152,5	189,5	189,5	546,5	546,5	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa akar masalah yang menghambat pencapaian IKU ini. Adapun akar-akar masalah tersebut antara lain:

a. Terdapat *paper* yang sudah terbit di jurnal tetapi belum dilaporkan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, PKN STAN.
b. Publikasi penelitian belum dilakukan oleh semua dosen di lingkungan PKN STAN. Publikasi bahkan masih didominasi oleh skripsi dan karya tulis tugas akhir mahasiswa.
c. Kualitas dari *publisher* dan jurnal perlu mendapat perhatian agar *paper* tidak dipublikasikan pada jurnal predator.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan yaitu perencanaan penelitian oleh dosen PKN STAN. Sampai dengan akhir periode Tahun 2022 terdapat 56 penelitian yang telah dipublikasikan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.8: Realisasi Penelitian yang Dipublikasikan Periode Tahun 2022

No	Kategori	Bobot	Jumlah	Nilai Indeks
1	Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi	7	6	42
2	Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang	5	8	40
3	Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti	3	141	423
4	Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus	2	0	0
5	Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN	1	38	38
6	Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5	7	3,5
	Total			**546,5**

Sementara itu rekomendasi renacna aksi untuk dilaksanakan pada periode-periode berikutnya antara lain:

a. Pembuatan proposal penelitian;
b. Pelaksanaan penelitian; dan
c. Pelaksanaan seminar hasil penelitian.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kualitas Penelitian” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
193	442	193	335	546,5

4b-N Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

Penyelarasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan *talent management* meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi. Menimbang kewenangan dan ketepatan proses bisnis, maka pengukuran IKU ini didasarkan pada aspek penempatan dan pelaksanaan studi, yaitu proses penempatan *awardee* dan kelulusan sesuai dengan jadwal.

Adapun IKU ini diukur berdasarkan:

a. Tingkat penempatan *awardee* pada *top 30 universities by subject* (bobot penilaian 10%); dan
b. Tingkat kelulusan tepat waktu pada *top 30 universities by subject* (bobot penilaian 90%).

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

4b-N	SS: Pendidikan yang *Fit for Purpose*							
	IKU: Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	80%	80%	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	99,41	99,41	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Pada tahun 2022 ini tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini. Sementara itu tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 ini adalah pelaksanaan penempatan *awardee* sebesar 94,12% ($\frac{96}{102}$) dan tingkat kelulusan tepat waktu sebesar 100% ($\frac{18}{18}$).

Rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilaksanakan pada periode-periode berikutnya antara lain:

a. Membuka kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dalam proses seleksi bersama;
b. Seleksi calon penerima beasiswa;
c. Melakukan pengelolaan *predeparture*; dan
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi periodik bersama UE1 dan perguruan tinggi mitra.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	**Realisasi 2021**	**Target Renstra**	**Target 2022**	**Realisasi 2022**
75%	81,47%	80%	80%	99,41

SS-5. Pelatihan yang Valid

Pelatihan yang valid adalah pelatihan yang desain pembelajarannya telah lulus validasi program dan telah dijamin kualitasnya, mulai dari proses analisis kebutuhan pembelajaran, penyusunan desain pembelajaran, validasi program, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai dengan sarana dan prasarana pembelajaran, telah dipastikan sesuai dengan standar minimal yang telah diatur.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5a-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4	5	120,00
5b-N	Tingkat Validasi Program Pembelajaran	100	120	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Pelatihan yang Valid" ini adalah sebagai berikut.

5a-N Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun indeks pemenuhan standar mutu mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK.

Pengukuran kualitas pembelajaran mengacu pada Keputusan Kepala BPPK terkait penjaminan mutu yang berlaku, antara lain terkait hal-hal sebagai berikut.

a. Analisis kebutuhan pembelajaran;
b. Desain pembelajaran;
c. Validasi program;
d. Penyelenggaraan pembelajaran;
e. Evaluasi pembelajaran; dan
f. Sarana dan prasarana pembelajaran.

Pada tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

5a-N	SS: Pelatihan yang Valid							
	IKU: Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	4	4	4	4	4	4	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	5	5	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan secara semesteran. Akan tetapi dikarenakan masih dalam proses penyempurnaan instrumen penjaminan mutu, maka IKU ini belum diukur pada periode semester I tahun 2022.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2022 adalah:

a. Telah disusun jadwal audit internal penjaminan mutu.
b. Telah dilakukan audit internal penjaminan mutu.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode-periode berikutnya adalah:

a. Penyempurnaan instrumen penjaminan mutu.
b. Audit internal penjaminan mutu tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
100	100	5	4	5

5b-N Tingkat Validasi Program Pembelajaran

Seperti halnya IKU "Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran", IKU ini juga bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memnuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Validasi program pembelajaran adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pembelajaran dan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta pembelajaran dan tujuan diadakannya pembelajaran tersebut. Adapun program pembelajaran yang divalidasi adalah program pembelajaran hasil rancangan pusdiklat. Program yang divalidasi tersebut adalah:

a. Seluruh program pelatihan baru yang akan diselenggarakan tahun 2022; dan
b. Seluruh program pelatihan lama yang belum divalidasi dan akan diselenggarakan tahun 2022;
c. Termasuk *e-learning* dan PJJ;
d. Tidak termasuk pelatihan insidental.

Program pembelajaran yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4 dan tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 serta dinyatakan tervalidasi baik sekali. Adapun kategori penilaian tersebut berdasarkan hasil penilaian oleh tim validasi program pembelajaran. Tim validasi program ini terdiri atas pihak internal dan eksternal BPPK. Validasi yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal ini mengacu pada rancangan peraturan/ peraturan Kepala BPPK terbaru tentang Pedoman Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Formula untuk menghitung capaian kinerja atas IKU “Tingkat Validasi Program Pembelajaran” ini tercantum dalam **Rumus 3.4** berikut.

Rumus 3.4: Formula Penghitungan Realisasi IKU

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Program\ Pelatihan\ yang\ Mendapat\ Nilai\ Validasi\ A}{Jumlah\ Program\ Pelatihan\ yang\ Ditaragetkan\ Divalidasi\ Tahun\ 2022} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

5b-N	SS: Pelatihan yang Valid							
	IKU: Tingkat Validasi Program Pembelajaran							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120	120	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Akar masalah dalam melakukan pencapaian IKU “Tingkat Validasi Program Pembelajaran” ini adalah terdapatnya penyempurnaan mekanisme validasi program yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya validasi program pada periode semester I tahun 2022. Validasi program baru dapat dilaksanakan pada periode semester II.

Sepanjang periode Tahun 2022 ini tindakan yang telah dilakukan adalah pelaksanaan validasi terhadap 137 program pelatihan. Dari 137 program tersebut keseluruhannya mendapatkan validasi A. Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan pada periode berikutnya adalah pelaksanaan proses validasi program pembelajaran tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Validasi Program Pembelajaran” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	100	120

SS-6. Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel

Sertifikasi kompetensi yang kredibel adalah proses pengakuan kompetensi di bidang keuangan negara yang dilaksanakan dengan megnacu pada standar kompetensi, sesuai dengan kebutuhan unit pengguna, dan hasil sertifikasinya dapat dipercaya.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6a-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	85%	99,32%	116,85

Indeks capaian untuk SS ini adalah **116,85**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel" ini adalah sebagai berikut.

6a-N Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi dilakukan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP), AKPD, Ahli Kepabeanan, dan sertifikasi pada PKN STAN.

Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4 yang dilakukan ketika ujian sertifikasi berlangsung atau melalui situs web sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat. Adapun pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 80% peserta menyatakan puas terhadap layanan program sertifikasi. Peserta dinyatakan puas apabila menilai ≥3 pada minimal 50% aspek yang dinilai.

Adapun aspek layanan yang dinilai meliputi:

- Penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian (waktu dan tempat);
- Alokasi waktu ujian;
- Kelayakan tempat dan sarana prasarana ujian;
- Informasi terkait hasil ujian; dan
- Profesionalitas petugas saat ujian.

Sementara itu aspek kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi meliputi:

a. Penyiapan sarana dan prasarana;
b. Penyiapan naskah soal;
c. Penyiapan administrasi ujian;
d. Ketersediaan tim penguji sebelum ujian;
e. Kesesuaian pelaksanaan ujian dengan jadwal;
f. Ketersediaan dokumentasi ujian.

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.5: Formula Penghitungan Realisasi IKU

$$Realisasi = (40\% \times Komponen\ A) + (60\% \times Komponen\ B)$$

Adapun Komponen A adalah persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/ kesesuaian janji layanan. Sedangkan Komponen B adalah persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

6a-N	SS: Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel							
	IKU: Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	85%	85%	
Realisasi	*N/A*	97.80%	97.80%	97,80%	97,80%	99,32%	99,32%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	116,85	116,85	

Sepanjang periode Tahun 2022, tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini. Adapun sampai dengan akhir Tahun 2022 ini telah dilakukan sertifikasi pada Pusdiklat BC, Pusdiklat KNPK, dan PKN STAN. Adapun tingkat kesesuaian SOP-nya mencapai 100%, sedangkan kepuasan peserta sertifikasi adalah sebesar 98,29%.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan pada periode berikutnya adalah:

a. Persiapan proses sertifikasi; dan
b. Pelaksanaan ujian kompetensi.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
80%	98,8%	80%	85%	99,32%

SS-7. Manajemen Pengetahuan yang *Reliable*

Manajemen pengetahuan yang *reliable* adalah penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/ informasi dalam penyelesaian pekerjaan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7a-N	Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	115,29%	115,29
7b-N	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	3	4	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **117,65**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Manajemen Pengetahuan yang *Reliable*" ini adalah sebagai berikut.

7a-N Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC

Kemenkeu *Learning Center* (KLC) merupakan media pembelajaran daring yang berisi berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. KLC dapat diakses melalui laman https://klc2.kemenkeu.go.id.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan *knowledge document* atau materi pembelajaran di bidang keuangan negara pata platform KLC. Adapun *knowledge* yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi atau *knowledge document* yang ada pada menu Pusat Pengetahuan (*Knowledge Center*). IKU ini diukur melalui tiga aspek, antara lain sebagai berikut.

a. Efektivitas pengelolaan *Community of Practice* (CoP) (bobot penilaian 20%), diukur berdasarkan jumlah *lesson learned* dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. Adapun CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi *lesson learned* yang diunggah ke KLC.
b. *User engagement*, diukur berdasarkan *bounce rate* KLC v2 (bobot penilaian 10%) dan jumlah *unique pageviews* (bobot penilaian 30%).
c. Kualitas konten, diukur berdasarkan rata-rata *rating* yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu Pusat Pengetahuan (*Knowledge Center*) yang telah mendapatkan penilaian/ *rating* minimal 30 kali (bobot penilaian 40%).

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

7a-N	SS: Manajemen Pengetahuan yang *Reliable*							
	IKU: Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	50%	60%	60%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	73,44%	88,31%	88,31%	98,91%	98,91%	115,29%	115,29%	Max/TLKV
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	115,29	115,29	

Realisasi sebesar 98,91% ini memiliki perincian sebagai berikut.

a. Efektivitas pengelolan CoP (bobot 20%): 84,41%.
b. *Bounce rate*: realisasi 19,15% dengan capaian sebesar 120%.
c. *Page view*: realisasi sebesar 149.127 dengan capaian 73,10%.
d. *Rating*: realisasi sebesar 4,95 dengan capaian sebesar 120%.

Sepanjang periode Tahun 2022 ini, akar masalah yang menghambat capaian IKU ini adalah masih belum terdapat standar waktu proses penjaminan mutu yang dilakukan sebelum aset intelektual dapat diterbitkan pada KMS. Hal ini mengakibatkan terdapat aset intelektual yang sudah diunggah tetapi masih belum dapat dilihat oleh pegawai karena belum melalui tahap penjaminan mutu. Adapun tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan pemanfaatan aset intelektual pada KLC2 s.d. akhir Desember 2022.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan pada periode berikutnya yaitu:

a. Penyusunan *knowledge document*; dan
b. Penggunakan *knowledge document* yang ada di KLC sebagai pemerkaya materi pembelajaran.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
100%	116%	100%	100%	115,29%

7b-N Tingkat Kematangan *Knowledge Management*

Kebijakan mengenai *knoledge management* (KM) di lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Proses inisiasi KMK di BPPK telah dimulai sejak tahun 2015 dengan dimunculkannya menu Pusat Pengetahuan pada aplikasi KLC.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan *knowledge management* menggunakan APO (*Asian Productivity Organization*) *Levels of Knowledge Management Maturity*. Adapun kematangan *knowledge management* tersebut terdiri atas lima level, yaitu:

a. Level 1: *Reaction*;
b. Level 2: *Initiation*;
c. Level 3: *Introduction*;
d. Level 4: *Refinement*;
e. Level 5: *Maturity*

Pada periode Tahun 2022, IKU ini belum memiliki capaian karena memiliki target tahunan.

7b-N	SS: Manajemen Pengetahuan yang *Reliable*							
	IKU: Tingkat Kematangan *Knowledge Management*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	3	3	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	4	4	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Akar masalah yang muncul dalam pencapaian target IKU ini antara lain sebagai berikut.

a. Pengukuran maturitas dengan menggunakan APO merupakan hal yang baru di Kementerian Keuangan sehingga penentuan bukti dukungnya masih multipersepsi sehingga perlu distandardisasi.
b. Adanya pemutakhiran instrumen APO dari SGO sehingga hasil pembahasan yang sudah jadi harus ditinjau ulang dengan dokumen baru tersebut.

Adapun sampai dengan akhir Tahun 2022 terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Telah diputuskan menggunakan instrumen pengukuran APO sesuai dengan arahan Kepala BPPK.
b. Penyelenggaraan *workshop* persiapan pengukuran *maturity* telah dilaksanakan pada April dan Juni 2022. Adapun pengukuran direncanakan menggunakan metode asesmen.
c. SOP manajemen pengetahuan telah diinisiasi dan sudah mendapatkan masukan dari pusdiklat terkait dengan konsep SOP tersebut.
d. Melakukan FGD finalisasi rubrik dan bukti dukung asesmen tingkat kematangan manajemen pengetahuan yang dihadiri oleh pengelola manajemen pengetahuan di pusdiklat-pusdiklat pada 22 s.d. 23 Juni 2022.
e. Telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap seetiap pertanyaan pada survei maturitas manajemen pengetahuan dengan hasil semuanya valid.
f. Pengukuran maturitas manajemen pengetahuan telah selesai dilaksanakan pada 25 November 2022 dengan hasil maturitas pada Kementerian Keuangan dan BPPK adalah 4 (*refinement*) dari skala 5.

g. Telah dilakukan *one-on-one meeting* untuk berkonfirmasi dan melakukan pendalaman strategi perbaikan terkait implementasi manajemen pengetahuan.
h. Telah dilakukan penyempurnaan konsep Rancangan KMK tentang Cetak Biru Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan BPPK.
b. Pengukuran tingkat kematangan manajemen pengetahuan.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Tingkat Kematangan *Knowledge Management*" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	3	4

SS-8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya Kemenkeu Satudalam ekonsistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan empat buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100	115,13	115,13
8b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	94,60%	102,83
8c-CP	Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	100	120	120,00
8d-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,91	110,14

Indeks capaian untuk SS ini adalah **112,28**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif" ini adalah sebagai berikut.

8a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Salah satu sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif. Melalui sasaran strategis ini, unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut, BPPK memiliki IKU "Tingkat kualitas pengelolaan SDM". IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun IKU ini mengukur kualitas pengelolaan SDM berdasarkan dua komponen berikut:

a. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta, dan sistem kepegawaian (bobot penilaian 30%).
b. Implementasi mutasi antar-UE1/Non-Eselon sebesar 30% (bobot penilaian 70%).

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8a-CP	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	IKU: Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	110,63	115	115	120	120	115,13	115,13	Max/TLKV
Capaian	110,63	115,00	115,00	120,00	120,00	115,13	115,13	

Adapun perincian penilaian realisasi adalah sebagai berikut.

a. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta, dan sistem kepegawaian:
    a. Diukur berdasarkan komponen persentase pemenuhan kompetensi SDM, dengan nilai realisasi sebesar 103,76% dari target 90,75%.
    b. Indeks kualitas manajemen talenta, dengan realisasi 3,25 dari target 3,75 skala 4.
    c. Tingkat pemanfaatan HRIS untuk mendukung kebijakan dan layanan SDM, dengan realisasi sebesar 108,82% dari target 100%.
b. Implementasi mutasi antar-UE1/Non-Eselon sebesar 30%, memiliki nilai realisasi sebesar 120 (bobot penilaian 70%).

Beberapa hal berikut merupakan isu utama dan implikasi pelaksanaan IKU "Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM".

a. Kompetensi SDM pada tahun ini diukur melalui asesmen manajerial maupun asesmen teknis berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017.
b. Manajemen talenta merupakan proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan *succession planning* organisasi.
c. Salah satu *output* dari manajemen talenta adalah para *talent* yang berada dalam *talent pool* di lingkungan BPPK.
d. HRIS merupakan sistem informasi manajemen SDM untuk pengelolaan SDM, organisasi, aturan, dan infrastruktur berbasis teknologi informasi secara terpadu. Pemanfaatan HRIS dalam mendukung kebijakan dan layanan SDM dapat didukung melalui dua kegiatan utama, yaitu pemutakhiran data dan dokumen serta pemanfaatan/ utilisasi data HRIS. Kegiatan pemutakhiran data SDM menjadi hal yang sangat penting karena landas data (*database*) HRIS saat ini sudah digunakan di banyak aplikasi, seperti aplikasi e-Tukin, e-performance, OA, dan lain-lain. Mengingat saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data HRIS dan GPP maka setiap pegawai wajib memastikan data SDM-nya di HRIS sudah benar. Hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan data maka dapat berdampak pada pembayaran gaji.
e. Implementasi mutasi antarunit eselon I/ non-eselon mengukur persentase pelaksanaan mutasi antarunit eselon I dan kepuasan atas pelaksanaannya.

Sementara itu, hal-hal berikut merupakan akar masalah pelaksanaan IKU ini.

a. Asesmen teknis merupakan kegiatan yang baru diselenggarakan pada tahun 2022 sehingga belum ada pengetahuan dan pengalaman penyusunan *tools* untuk kegiatan yang serupa. SKTJ sebagai standar pengukuran kompetensi teknis ditargetkan tersusun pada tahun 2022, bersamaan dengan *piloting* asesmen teknis sehingga jangka waktu untuk melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada calon asesi cukup terbatas.
b. Belum terlaksananya manajemen talenta di BPPK dikarenakan belum adanya arahan terkait pelaksanaan program tersebut dari Sekretariat Jenderal.
c. Belum dilakukannya survei kepuasan pelaksanaan mutasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai antarunit eselon I.
d. Belum adanya *tools* untuk melakukan pemantauan capaian dosir elektronik sehingga capaian IKU belum bisa dihitung secara akurat.
e. Tidak semua pegawai sadar akan kebenaran data SDM di HRIS yang menyebabkan perbedaan data HRIS-GPP cukup besar serta capaian pengiriman form akurasi data belum maksimal.

Selama periode Tahun 2022 ini, BPPK telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.

a. Tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta, dan sistem kepegawaian:
    - *Assessment Center* bagi pejabat pengawas yang belum mempunyai HAC dengan sembilan kompetensi telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Juli 2022, *re-Assessment Center* bagi pejabat pengawas dnegan skor JPM di bawah 80 dijadwalkan dilaksanakan pada Juli 2022;
    - Bagi pejabat administrator dan pejabat pegawasa yang memiliki skor JPM di bawah 80 telah mengikuti *online group coaching* pada Maret 2022 dan pada akhir periode Tahun 2022 sedang menyusun program pengembangan individu;
    - Telah dilakukan pembahasan sepuluh jabatan yang akan menjadi jabatan taraget asesmen teknis pada triwulan keempat tahun 2022;

- Telah disusun KSA, identifikasi asesi dan asesor, serta penyiapan tenaga pendukung asesmen teknis.
- Telah dilaukan penyusunan *tools* asesmen teknis untuk sepuluh jabatan target.
- Membuat lini masa kegiatan yang dilakukan untuk asesmen teknis periode September s.d. November 2022. Pada September 2022 telah diselenggarakan sosialisasi kepada asesor dan asesi dalam rangka persiapan pelaksanaan asesmen teknis di Oktober 2022.
- Memantau arahan dari Sekretariat Jenderal terkait perkembangan pelaksanaan program manajemen talenta.
- Melakukan rapat koordinasi penyamaan data HRIS-GPP dengan para UPSDM dan PBDK di lingkungan BPPK;
- Memberikan meja bantuan terkait pemutakhiran data HRIS dalam rangka sinkronisasi data HRIS-GPP;
- Pemantauan dan evaluasi hasil sinkronisasi data HRIS-GPP;
- Melakukan koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal terkait pemantauan capaian dosir elektronik di HRIS.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap keakuratan dan kelengkapan data HRIS serta pemantauan pelaksanaan deklarasi data SDM.

b. Implementasi mutasi antar-UE1/Non-Eselon:
   - Sekretaris Badan telah berkoordinasi dengan Kepala Biro SDM dan para sekretaris unit eselon I lain untuk melakukan pertukaran pegawai pada jabatan administrator dan jabatan pengawas pada periode semester pertama tahun 2022.
   - Telah dilakukan mutasi dua pejabat administrator dan empat pejabat pengawas pada Maret 2022.

Berikut adalah rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh BPPK dengan UIC Bagian SDMKI Sekretariat BPPK pada periode mendatang.

a. Kompetensi SDM: memetakan pejabat dengan skor JPM di bawah 80 dan yang belum memiliki HAC sembilan kompetensi kemudian mempersiapkan jadwal *re-Assessment Center*-nya, serta melakukan persiapan asesmen teknis pada sepuluh jabatan target BPPK.
b. Manajemen talenta: melakukan analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan, program pengembangan *talent*, evaluasi *talent*, penempatan *talent* pada jabatan target, dan laporan pelaksanaan manajemen talenta.
c. Pemanfaatan HRIS: melakukan sinkronsisasi data HRIS dan GPP menggunakan *role* PBDK yang telah diberikan oleh Biro SDM.
d. Koordinasi secara intens dengan para sekretaris UE I lain serta didasarkan pada analisis data yang memadai.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	100	115,13

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.965.641.408 ,00 dari total biaya sebesar Rp7.301.952.000 ,00.

8b-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu

IKU ini bertujuan untuk me-*monitor* dan memastikan implementasi Inisiatif Strategis RBTK (termasuk di dalamnya *project data analytics*) terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu maupun kualitas.

Transformasi digital merupakan bagian dari misi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 14 s.d. 15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 IS Kementerian Keuangan dan 19 IS Berbasis *Project Data Analytics*.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8b-CP	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	IKU: Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/TLKV
Realisasi	27,60%	46,96%	46,96%	75,46%	75,46%	94,60%	94,60%	
Capaian	120,00	102,09	102,09	109,36	109,36	102,83	102,83	

IKU ini mengukur capaian pelaksanaan program RBTK Kementerian Keuangan. Persentase penyelesaian inisiatif program IS RBTK dapat diukur secara berkala sesuai dengan perincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap *milestone* penyelesaian masing-masing inisiatif program IS RBTK. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan *milestone* IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

IS dengan UIC BPPK berupa "Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization*". *Data analytics* dengan UIC BPPK berupa "Rekomendasi *Expert Locator*/ Penyusun Aset Intelektual".

Selama tahun 2022 ini tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat BPPK sampai dengan akhir periode Tahun 2022 antara lain:

a. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022.
b. Proses finalisasi Pedoman Pembelajaran Terintegrasi.
c. Sosialisasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*) melalui kegiatan LOKeR.
d. Pengumpulan data untuk penyusunan cetak biru manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan.
e. Pengumpulan data untuk penyusunan ketentuan terkait penghargaan/ *reward system*.
f. Pemahaman bisnis dan eksplorasi data dalam penyusunan rekomendasi *expert locator*/ penyusun aset intelektual.
g. Telah disusun kajian penerapan modul pemantauan dan evaluasi untuk pelaporan dan analisis implementasi KM.
h. Telah dilaksanakan pengembangan modul pemantauan dan evaluasi untuk pelaporan dan analisis implementasi KM pada aplikasi KMS.
i. Telah dilaksanakan proses *legal drafting* pedoman pembelajaran terintegrasi.
j. Telah disusun konsep cetak biru manajemen pengetahuan.
k. Telah disusun konsep ketentuan terkait penghargaan pegawai (*reward system*).
l. Telah dilaksanakan pembahasan dengan unit eselon I terkait ketentuan penghargaan/ *reward system*.
m. Telah dilaksanakan penyiapan data serta uji coba untuk model yang digunakan pada rekomendasi *expert locator*.
n. Telah dilaksanakan *entry meeting* dan penyampaian unit sampel penilaian tingkat implementasi LO tahun 2022.
o. Telah diselesaikan kajian penerapan *advanced search* pada KMS.
p. Telah dilaksanakan verifikasi laporan hasil pengumpulan data AKP.
q. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Pedoman Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
r. Telah dilaksanakan pengajuan *hosting* aplikasi *Expert Locator* ke Pusintek.
s. Telahdilaksanakan sosialisasi aplikasi *Expert Locator* ke unit-unit di lingkungan BPPK.
t. Telah dilaksanakan pengembangan modul *advanced search* pada KMS.
u. Telah dilaksanakan harmonisasi AKP.
v. Telah dilaksanakan penyusunan desain pembelajaran.
w. Telah dilaksanakan implementasi manajemen pengetahuan dan implementasi organisasi pembelajar.
x. Telah dilaksanakan finalisasi pedoman penghargaan/ *reward system*.

Sementara itu beberapa rekomendasi rencana aksi berikut direncanakan akan dilaksanakan oleh Bagian OTL dan Bagian TIKMP pada periode mendatang.

a. Implementasi LO dan pembelajaran terintegrasi;
b. Pelaksanaan manajemen pengetahuan.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
85%	98,16%	-	92%	94,60%

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp0 ,00 dari total biaya sebesar Rp0 ,00.

Nilai realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu" yang diraih BPPK tahun 2022 merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan unit eselon I/non-eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun perincian capaian yang diraih oleh unit-unit eselon I/non-eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9: Perincian Capaian IS Kementerian Keuangan Tahun 2022

No	Unit	Target	Realisasi	Capaian
1	Sekretariat Jenderal	92,00%	99,89%	109%
2	Direktorat Jenderal Anggaran	92,00%	97,35%	106%
3	Direktorat Jenderal Pajak	92,00%	97,45%	106%
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	92,00%	97,64%	106%
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	92,00%	100,00%	109%
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	92,00%	99,52%	108%
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	92,00%	99,17%	108%
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	92,00%	100,00%	109%
9	Inspektorat Jenderal	92,00%	100,00%	109%
10	Badan Kebijakan Fiskal	92,00%	100,00%	109%
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	92,00%	94,60%	103%
12	Lembaga National Single Window	92,00%	97,37%	106%

8c-CP Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan peguatan budaya. Kegiatan penguatan budaya ini terutama ditujukan untuk budaya yang mendukung pola kerja baru. Adapun kegiatan dapat melalui *roadshow*, internalisasi, dan kegiatan lainnya. Hal ini agar pegawai dapat menyadari, memahami, dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/ kebiasaan efektif berbasis *core values* ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang perlu dibudayakan demi mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran.

IKU "Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu" ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap, dan perilaku/ kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi. Dengan IKU

ini diharapkan unit melakukan kegiatan penguatan budaya di lingkungannya terutama budaya yang mendukung pola kerja baru melalui *roadshow*/ internalisasi/ kegiatan lainnya.

Dengan demikian pegawai dapat menyadari, memahami, dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/ kebiasaan efektif berbasis *core value* ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

Pada tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8c-CP	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	IKU: Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	20	20	20	20	100	100	
Realisasi	*N/A*	26,67	26,67	40	40	120	120	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Akar masalah yang dapat menghambat pencapaian IKU ini antara lain

a. Sampai dengan akhir September 2022 pelaksanaan *roadshow* Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal sebagai salah satu kegiatan Duta Transformasi belum dapat direalisasikan karena Biro SDM belum bisa mendapatkan jadwal dari Menteri Keuangan.
b. Terdapat revisi manual IKU Penguatan Budaya Kementerian Keuangan di pertengahan periode triwulan kedua.
c. Sampai dengan akhir September 2022 belum dilakukan sosialisasi terkait pengukuran tingkat kematangan budaya Kementerian Keuangan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal.
d. Pedoman penguatan budaya Kemenkeu di BPPK perlu koordinasi dengan Pusdiklat KM dan PKN STAN.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang periode antara lain:

a. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi ke berbagai unit di lingkungan BPPK.
b. Menyampaikan duta transformasi tahun 2022 untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c. Mengusulkan pegawai di tingkat balai diklat di lingkungan BPPK sebagai agen perubahan.
d. Mengikuti program *Sharing Session Success Story* Duta Transformasi regional Kalimantan sebagai *lesson learned*.
e. Mengikuti FGD Penguatan Budaya Kementerian Keuangan melibatkan para Duta Transformasi di lingkungan BPPK.
f. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui sosialisasi kode etik.
g. Memasukkan budaya Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kurikulum pelatihan-pelatihan di BPPK.

h. Pelaksanaan Forum Sekretaris terkait budaya Kemenkeu yang dihadiri/ diwakili oleh pejabat administrator unit eselon I.
i. Melakukan kegiatan *Monitoring Change Agent* dan *sharing session* Duta Transformasi 2021 pada 7 September 2022.
j. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala BPPK mengenai Implementasi Budaya Kemenkeu di lingkungan BPPK.
k. Melaksanakan survei tingkat kematangan budaya Kemenkeu dengan hasil survei adalah 100%.

Sementara itu rekomendasi aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya dengan UIC Bagian SDMKI Sekretariat Badan antara lain:

a. Memberdayakan Duta Transformasi dan *Change Agent* dalam implementasi budaya Kementerian Keuangan.
b. Meningkatkan peran pimpinan sebagai *role model* dalam penguatan budaya Kementerian Keuangan.
c. Menyusun pedoman penguatan budaya Kementerian Keuangan di lingkungan BPPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu" ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	100	120

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp210.762.012 ,00 dari total biaya sebesar Rp1.297.720.000 ,00.

8d-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU "Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan" merupakan salah satu IKU *mandatory* di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi tahun 2022. IKU ini merupakan penyempurnaan dari IKU "Indeks efektivitas komunikasi publik" yang telah diterapkan pada tahun 2021.

IKU ini terdiri atas lima unsur pengukuran sebagai berikut:

a. Efektivitas komunikasi publik, dengan bobot 30%. Pengukuran efektivitas ini dilakukan dengan penelitian. Adapun objek penelitian berupa kampanye komunikasi publik dengan tema Kemenkeu Satu, termasuk APBN tahun anggaran 2022. Kampanye komunikasi publik disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi tiga saluran taktik sebagai berikut.
   - Aktivitas media massa, dengan frekuensi minimal satu kali dalam enam bulan.
   - Publikasi media sosial, dengan frekuensi minimal satu kali dalam enam bulan.

- Penyelenggaraan *event*, baik daring maupun luring, dengan frekuensi minimal satu kali dalam enam bulan.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif meliputi enam tahapan yang komprehensif sebagai berikut.

- Tahapan *input*, dengan bobot 20%. Tahapan ini diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.
- Tahapan *output*, dengan bobot 40%. Tahapan ini diukur berdasarkan pemenuhan *output* atas indikator keberhasilan yang disusun.
- Tahapan *outtakes*, dengan bobot 30%. Tahapan ini diukur melalui survei dengan kuesioner kepada *target audience*, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
- Tahapan *outcome*, dengan bobot 10%. Tahapan ini diukur melalui survei kuesioner kepada publik/ masyarakat umum untuk mengetahui apakah tujuan kampanye sudah tercapai.

b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi), dengan bobot 40%. Unsur pengukuran ini dilakukan dengan unsur penilaian sebagai berikut.
   - Penilaian Biro KLI: implementasi taktik (bobot 30%) dan implementasi pesan kunci (bobot 70%).
   - Penilaian unit eselon I: implementasi taktik (bobot 10%), jumlah konten media sosial (bobot 45%), dan *engagement* media sosial (bobot 45%).

c. *Employee advocacy* (pemangku tugas komunikasi), dengan bobot 5%. Nilai dari unsur pengukuran ini diambil dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi Kemenkeu Satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dibagi dengan total jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi Kemenkeu Satu di unit tersebut. Adapun periode pengukuran dilakukan secara bulanan.

d. Penanganan isu negatif, dengan bobot 20%. Unsur pengukuran ini merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merspon sentimen negatif terkait kebijakan Kementerian Keuangan yang muncul dalam bentuk cuitan di media sosial Twitter. Jumlah responden terhadap isu negatif melalui akun media sosial berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti. Adapun periode pengukuran dilakukan secara tahunan.

e. Kolaborasi pendukung program eksis, dengan bobot 5%. Unsur pengukuran ini merupakan upaya dalam menyukseskan Program Eksus dalam bentuk Tim Kerja Kehumasan Kementerian Keuangan. Adapun unsur yang menjadi penilaian adalah jumlah kegiatan perencanaan taktik Tim Kerja Kehumasan Kementerian Keuangan. Adapun periode pengukuran dilakukan secara semesteran.

Pada tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8d-CP	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	IKU: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
Realisasi	*N/A*	3,92	3,92	3,92	3,92	3,91	3,91	Max/Average
Capaian	*N/A*	110,42	110,42	110,42	110,42	110,14	110,14	

Ketercapaian target IKU ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan dan peran yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPPK. Adapun akar masalah yang muncul pada tahun 2022 ini antara lain:

a. BPPK tidak memiliki tupoksi secara langsung atau yang berhubungan langsung dengan pesan kunci/ narasi utama.
b. Tahun 2022 BPPK sudah memiliki narasi yang membahas tema khusus, tetapi untuk pembahasan yang lebih spesifik masih dalam proses pengembangan materi sehingga belum dapat dijabarkan secara spesifik.

Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan sampai dengan akhir periode Tahun 2022 ini.

a. Menyusun dokumen strategi komunikasi BPPK tahun 2022.
b. Menyampaikan nota dinas ke seluruh unit di lingkungan BPPK agar semua pegawai berpartisipasi pada kegiatan *employee advocacy*.
c. Melakukan pemenuhan Agenda Setting.
d. Melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan di BPPK kepada Biro KLI Sekretariat Jenderal.
e. Berkoordinasi dengan admin media sosial seluruh unit di BPPK untuk mengamplifikasi Agenda Setting Kementerian Keuangan secara rutin setiap minggu.
f. Melakukan pembahasan narasi pembelajaran terintegrasi dan melakukan amplifikasi narasi tersebut melalui media sosial.
g. Mengamplifikasi narasi terkait pembelajaran terintegrasi.
h. Melakukan koordinasi terkait siaran pers dengan unit kerja untuk dilaporkan ke Biro KLI.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilaksanakan pada periode mendatang oleh UIC Bagian TIKMP Sekretariat BPPK adalah memetakan taktik dan saluran komunikasi tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
3,55	3,75	-	3,55	3,91

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp366.472.682 ,00 dari total biaya sebesar Rp435.803.000 ,00.

SS-9. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak meewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

Adapun pengelolaan BMN yang produktif adalah apabila seluruh BMN telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100	112,78	112,78
9b-CP	Tingkat Penggunaan Aset Bersama	25	110%	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **116,39**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif” ini adalah sebagai berikut.

9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Pengelolaan keuangan, BMN, dan kegiatan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel merupakan sasaran dari kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pada Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” dan IKU “Persentase rekomendasi optimalisasi aset terindekasi *idle* Kemenkeu yang ditindaklanjuti”. IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” kemudian disempurnakan menjadi IKU “Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015”.

IKU ini terdiri atas empat komponen penilaian dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015, memiliki dua buah komponen pengukuran yaitu indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan BA 015.
b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dengan perhitungan mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.
c. Persentase implementasi *back office* terintegrasi, mengukur implementasi pelaksanaan integrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja.
d. Tingkat efisiensi belanja birokrasi, diukur dari rencana penghematan yang dihitung pada Unit Eselon I atas TIK yang sudah berjalan dan diimplementasikan sejak awal tahun 2022, mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/atau digitalisasi Kementerian Keuangan.

Adapun tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

9a-CP	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
	IKU: Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	109,89	110,91	110,91	110,49	110,49	112,78	112,78	Max/TLKV
Capaian	109,89	110,91	110,91	110,49	110,49	112,78	112,78	

Sampai dengan akhir periode Tahun 2022, perincian realisasi atas IKU “Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015” ini adalah sebagai berikut.

a. Indeks kualitas pelaporan BA 015, realisasi sebesar 99,91 dengan capaian 110,52.
b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, realisasi sebesar 95,50% dengan capaian 110,62.
c. Pesentase implementasi *back office* terintegrasi, realisasi sebesar 120% dengan capaian 120.
d. Tingkat efisiensi belanja birokrasi, realisasi sebesar 168,44 dengan capaian 120.

Selama tahun 2022, terkait dengan pencapaian sub-IKU “Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015”, terdapat akar masalah berupa pelaksanaan audit oleh BPK terhadap Laporan Keuangan BA 015 masih berjalan. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan terkait sub-IKU ini antara lain:

a. Melakukan verifikasi laporan keuangan tingkat satker dan UE1.
b. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BPPK.
c. Memfasilitasi permintaan dokumen dan pemeriksaan fisik BPK secara lengkap dan tepat waktu.
d. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait tindak lanjut temuan BPK.

e. Melakukan konfirmasi kepada PUPN/ KPKNL terkait perkembangan penagihan piutang yang sudah diserahkan ke PUPN.
f. Meminta satker terkait untuk melakukan koordinasi dengan PUPN/ KPKNL tterkait perkembangan penagihan piutang.
g. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Pusdiklat Pajak terkait tindak lanjut rekomendasi BPK pada Pusdiklat Pajak.
h. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penggabungan satker pusdiklat, termasuk penyusunan pedoman laporan keuangan likuidasi.
i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka persiapan pembahasan TLRHP BPK Semester I Tahun 2022.
j. Menyelenggarakan FGD dengan Pusdiklat BC, Pusdiklat KU, dan PKN STAN terkait rencana aksi atas rekomendasi temuan BPK pada 19 Juli 2022.
k. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut atas rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Jenderal.
l. Melakukan pendampingan reviu Inspektorat Jenderal atas temuan BPK pada Pusdiklat Pajak tahun 2015 dan 2016.
m. Menyelenggarakan FGD Pembinaan Pengadaan PPK pada 24 Oktober 2022.

Capaian sub-IKU “Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015” mengalami kenaikan yaitu dari 106,43 pada tahun 2021 menjadi 110,52 pada tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan BPPK untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian sub-IKU ini, ke depannya BPPK akan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

a. Melakukan tindak lanjut atas temuan audit BPK atas laporan keuangan tahun 2021 dan temuan tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian.
b. Melakukan asistensi dan bimbingan kepada satker dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya agar sesuai dengan rekomendasi dan kebijakan.
c. Melakukan asistensi dan bimbingan kepada satker dalam rangka pencatatan dan pelaporan TGR.
d. Melakukan koordinasi dengan satker terkait progres penagihan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN.
e. Memfasilitasi permintaan dokumen dan pemeriksaan BPK tahun 2022.
f. Melakukan pemantauan *to-do list* Monsakti dan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN.

Sementara itu sub-IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” memiliki akar masalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan UP dan TUP belum maksimal karena terdapat satu buah keterlambatan SPM UP yang disebabkan oleh pengajuan SPM berdekatan dengan batas waktu sehingga SP2D terbit sudah melewati batas waktu tersebut, serta adanya dua setoran TUP.
b. Capaian *Output* belum maksimal karena adanya Rincian *Output* (RO) yang progresnya belum mencapai target Progres Capaian Realisasi *Output* (PCRO) Triwulan I. Belum tercapainya target PCRO ini dikarenakan kegiatan/ RO tersebut direncanakan akan dimulai pelaksanannya apda Triwulan II. Seluruh RO diharapkan akan tercapai pada Triwulan IV.
c. Indikator IKPA Triwulan II TahuN 2022 yang belum maksimal nilainya adalah deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, dan capaian *Output*.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Melakukan koordinasi serta mengadakan FGD terkait tata cara pengakuan dan pengukuran RO dengan seluruh satker dan seluruh Bagian di Sekretariat BPPK.
b. Mengadakan rapat pembahasan IKPA, SMART, dan e-Monev Bappenas terkait integrasi satker bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Direktorat Sistem Penganggaran DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan seluruh pusdiklat.
c. Melakukan *video conference coaching clinic* dan forum *Community of Practice* pengelolaan keuangan BPPK secara rutin setiap bulan untuk pemonitoran, koordinasi, dan asistensi satker dalam pengelolaan keuangan.

Capaian sub-IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran" ini cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2022. Namun demikian, penurunan tersebut masih dapat ditoleransi mengingat capaian yang masih di atas target Renstra dan target sub-IKU. Penurunan capaian sub-IKU ini tidak serta merta menunjukkan penurunan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan BPPK. Perlu dilihat aspek lain penyebab penurunan ini. Salah satunya adalah adanya perubahan strategi dan reformulasi penilaian IKPA pada tahun 2022 yang dilakukan oleh regulator. Perubahan metode perhitungan, indikator, serta bobot indikator ini menyebabkan IKPA lebih sulit untuk dicapai.

Untuk menaikkan capaian sub-IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran" ini, pada masa mendatang BPPK akan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Mendorong satker agar melakukan akselerasi kegiatan dan belanja, khususnya belanja barang dan belanja modal.
b. Mendorong satker agar melakukan koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana (RUP dan RPD) dan melakukan pemutakhiran data RPD setiap kali terjadi perubahan.
c. Mendorng satker agar mempercepat proses penyampaian data kontrak ke KPPN agar tidak terjadi keterlambatan, serta mempercepat proses penyelesaian pengadaan.
d. Memastikan satker agar memantau tanggal karwas UP pada modul pembayaran di OMSPAN agar tidak terjadi keterlambatan pengajuan SPM UP, serta dalam mengajukan TUP Tunai agar menyusun renacna penggunaan dan pengeluaran secara efektif dan meminimalkan setoran.
e. Mendorong satker agar mengoptimalkan capaian RO agar mendapatkan nilai di atas 100.
f. Memastikan PPK, staf PPK, PPSPM, staf PPSPM, BP, dan BPP memproses tagihan APBN dengan baik, sesuai batas waktu yang ditetapkan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait sub-IKU "Persentase implementasi *back office* terintegrasi" s.d. akhir periode Tahun 2022 antara lain:

a. Mengikuti forum pembahasan infrastruktur *back office* terintegrasi bersama dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
b. Menyampaikan rencana penerapan *back office* terintegrasi kepada satker pada kegiatan forum diskusi.
c. Menunjuk pegawai yang masuk ke dalam *dedicated squad team*.
d. Berkoordinasi terkait permintaan akun PBDK yang akan mengawal penyamaan

data HRIS dan GPP pada periode transisi.

e. Mengadakan bimbingan teknis dengan PBDK yang ditunjuk untuk mempercepat penyamaan data HRIS-GPP.
f. Melakukan perbaikan data HRIS berdasarkan hasil penyandingan data.
g. Melakukan penghitungan gaji pegawai sesuai data yang telah diperbaiki untuk direviu oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku unit pembayar gaji terintegrasi.
h. Melakukan pembayaran gaji pegawai BPPK secara terintegrasi sejak pembayaran gaji bulan Juli 2022.
i. Menyampaikan informasi integrasi pembayaran tunjangan kinerja ke unit kerja melalui nota dinas dan pada saat pelaksanaan kegiatan *coaching clinic* Bagian Keuangan Sekretariat BPPK.
j. Mengikuti FGD *monitoring* dan evaluasi sentralisasi pembayaran tunjangan kinerja tahap I dan persiapan sentralisasi pembayaran tunjangan kinerja tahap II dan III.
k. Melakukan koordinasi dengan pengelola tunjangan kinerja satker dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan rekening penyaluran tunjangan kinerja bagi pegawai sudah tepat.

Capaian sub-IKU "Persentase implementasi *back office* terintegrasi" ini dihitung secara terpusat oleh Sekretariat jenderal. Tahun 2022 ini BPPK mendapatkan capaian sebesar 120. Pada tahun 2023 sub-IKU ini direncanakan akan kembali diterapkan sebagai komponen dari IKU "Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015". Oleh sebab itu, BPPK telah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan BPPK pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

a. Melakukan koordinasi dengan anggota *dedicated squad team* untuk meningkatkan layanan gaji terintegrasi.
b. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk menyiapkan probis integrasi e-Kemenkeu modul Cuti ke dalam aplikasi gaji dan tunjangan kinerja terintegrasi.

Sementara itu, beberapa hal berikut telah dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan sub-IKU "Tingkat efisiensi belanja birokrasi".

a. Mempelajari kertas kerja dan peraturan terkait IKU "Tingkat efisiensi belanja birokrasi" periode tahun 2020.
b. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan tentang peraturan dan kertas kerja pengukuran "Tingkat efisiensi belanja birokrasi" tahun 2022.
c. Menyampaikan rencana efisiensi belanja birokrasi BPPK yang sedang direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.
d. Melakukan one-on-one pendalaman kertas kerja IKU "Efisiensi Belanja Birokrasi" dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal pada 25 Mei 2022.
e. Menyampaikan data realisasi efisiensi belanja birokrasi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada 7 Juli 2022.
f. Sampai dengan Desember 2022 efisiensi belanja birokrasi sebesar 191,40% atau terealisasi sebesar Rp725,16 miliar dari target efisiensi sebesar Rp473,57 miliar.
g. Sampai dengan Desember 2022 nilai rata-rata peningkatan produktivitas adalah sebesar 145,48%.

Sub-IKU "Tingkat efisiensi belanja birokrasi" menjadi IKU *mandatory* pada tahun 2020 dan tahun 2022. Tahun 2021 sub-IKU ini tidak ada. BPPK mampu mempertahankan capaian maksimal dari sub-IKU ini yaitu sebesar 120. Sebagai rencana aksi tahun 2023, BPPK akan berkoordinasi dengan unit pembina, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, terkait keberlanjutan sub-IKU ini pada tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
90	95,79	-	100	112,78

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp22.182.000 ,00 dari total biaya sebesar Rp24.790.000 ,00.

9b-CP Tingkat Penggunaan Aset Bersama

IKU ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui optimalisasi penggunaan aset bersama. Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal mendorong kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menginisiasi penggunaan aset bersama pada satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terkait implementasi SBSK dan penggunaan aset bersama.

Adapun pengukuran IKU ini menggunakan tiga komponen pengukuran sebagai berikut.

a. Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK, dengan bobot 50%, berupa tingkat kesesuaian SBSK gedung kantor yang digunakan oleh masing-masing satker Kementerian Keuangan.
b. Persentase pengurangan jumlah satker yang belum memiliki gedung kantor, dengan bobot 30%.
c. Persentase pengurangan biaya sewa gedung kantor, dengan bobot 20%.

Mengingat kondisi pada BPPK, komponen yang dihitung adalah berupa persentase pengurangan jumlah satker yang belum memiliki gedung kantor karena di BPPK tidak ada sewa atau biaya sewa gedung kantor.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

9b-CP	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
	IKU: Tingkat Penggunaan Aset Bersama							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	25	25	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	110%	110%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120,00	120,00	

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat masalah yang dapat menghambat capaian IKU ini. Sementara itu tindakan-tindakan yang telah diambil antara lain:

a. Melakukan koordinasi terkait persiapan pendataan gedung kantor di lingkungan BPPK.
b. Melakukan harmonisasi triwulan pertama yang dilaksanakan pada 22 s.d. 24 Maret 2022 dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPPK.
c. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Kementerian Keuangan pada 31 Maret 2022.
d. Mengikuti rapat persiapan pendataan dan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada 7 April 2022.
e. Beberapa satker telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPKNL terkait.
f. Beberapa satker telah mengirimkan data pengukuran kesesuaian SBSK, Sekretariat BPPK sudah mengajukan pada Mei 2022.
g. Melakukan harmonisasi triwulan kedua yang dilaksanakan pada 27 Juni 2022 dengan seluruh unit kerja.
h. Seluruh satker mengikuti bimbingan teknis penatausahaan BMN pada 28 s.d. 30 Juni 2022.
i. Melakukan harmonisasi triwulan ketiga yang dilaksanakan pada 26 September 2022 dengan seluruh unit kerja.
j. Melakukan alih fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan sesungguhnya untuk meningkatkan nilai tingkat kesesuaian SBSK.

Tidak terdapat target pada Renstra BPPK 2020-2024 terkait IKU ”Tingkat Penggunaan Aset Bersama” ini. Namun demikian, karena IKU ini diproyeksikan akan diterapkan kembali pada tahun 2023, maka BPPK menyusun rekomendasi rencana aksi. Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan tingkat penggunaan aset bersama.
b. Melakukan kegiatan harmonisasi dalam rangka *monitoring* pengelolaan dan pemeliharaan aset BPPK.
c. Melakukan pendataan, perhitungan SBSK, dan penyusunan kertas kerja terkait luasan gedung kantor di lingkungan BPPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Penggunaan Aset Bersama” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
-	-	-	25	110%

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp192.669.753 ,00 dari total biaya sebesar Rp207.837.000 ,00.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sudah sangat baik. Dibandingkan dengan realisasi unit-unit eselon I/non-eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, BPPK menduduki peringkat teratas dalam realisasi IKU “Tingkat Penggunaan Aset Bersama” ini. Adapun perincian realisasi IKU ini di seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Aset Bersama di Lingkungan Kemenkeu

No	Unit	Realisasi Komponen I	Realisasi Komponen II	Realisasi Komponen III	Realisasi IKU
1	Sekretariat Jenderal	93,50	33,33	56,83	**68,12**
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	***N/A***
3	Direktorat Jenderal Anggaran	0,00	0,00	0,00	***N/A***
4	Direktorat Jenderal Pajak	87,01	5,88	7,24	**46,72**
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	90,97	0,00	0,00	**90,97**
6	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	81,18	25,00	1,08	**48,31**
7	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	99,62	0,00	0,00	**99,62**
8	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	0,00	0,00	0,00	***N/A***
9	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	100,00	0,00	0,00	**62,50**
10	Badan Kebijakan Fiskal	0,00	0,00	0,00	***N/A***
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	110,00	0,00	0,00	**110,00**
12	Lembaga National Single Window	0,00	0,00	74,31	**29,72**

SS-10. Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya penguatan pengelolaan layanan TIK, yaitu melalui ketersediaansistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analyssi* (BIA).

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100	109,31	109,31

Indeks capaian untuk SS ini adalah **109,31**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif" ini adalah sebagai berikut.

10a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK

IKU ini mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui dua komponen, yaitu:

a. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK, yaitu kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis baik yang ada dalam IS RBTK maupun yang tidak, yang diselesaikan sesuai norma waktu.
b. Tingkat implementasi *digital enabling ecosystem* Kementerian Keuangan, dengan ruang lingkup berupa seluruh aplikasi yang telah operasional minimal selama dua tahun sebelum tahun 2021.

Adapun tujuan IKU ini adalah mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin dan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

10a-CP	SS: Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif							
	IKU: Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	105	105	104,53	104,53	109,31	109,31	
Capaian	120,00	105,00	105,00	108,62	108,62	109,31	109,31	

Adapun perincian realisasi tersebut yaitu:

a. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK.

   Sub-IKU ini memiliki realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%. Dengan demikian capaian sub-IKU ini tahun 2022 adalah sebesar 111,11.

b. Tingkat implementasi *digital enabling ecosystem* Kementerian Keuangan.

   Sub-IKU ini memiliki realisasi sebesar 107,5 dari target sebesar 100. Dengan demikian capaian sub-IKU ini tahun 2022 adalah sebesar 107,5.

IKU "Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK" ini baru diterapkan pada tahun 2022. Namun demikian IKU ini memiliki sub-IKU "Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK" yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu maupun Renstra BPPK 2020-2024. Realisasi sub-IKU ini tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target 87%, sehingga memiliki capaian sebesar 114,94. Meskipun capaian sub-IKU ini tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2021, tetapi hal tersebut

tidak berarti realisasi tahun 2022 menurun. Capaian terlihat lebih rendah karena target tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2021.

Sepanjang periode Tahun 2022, terdapat beberapa akar masalah terkait pelaksanaan IKU ini, antara lain:

a. Belum ada penetapan proses bisnis pembelajaran secara resmi, terutama level SOP belum terdefinisikan dengan baik. Sementara masukan dari pusdiklat dan balai diklat yang dikumpulkan sebagian besar berupa tambahan fitur yang bersifat minor/ perbaikan kutu (*bug*). Hal ini berimplikasi pada kurang lengkapnya fitur yang nantinya akan dikembangkan.
b. Penetapan dan simplifikasi aturan serta penyusunan SOP baru terkait pembelajaran dilakukan sepanjang tahun 2022 sehingga berkejaran dengan penyelesaian proyek strategis TIK ini.
c. Perbedaan data aplikasi BPPK yang *hosting* dan *colocation* pada Pusintek dengan data di BPPK.
d. Masih adanya beberapa aplikasi yang memiliki pertumbuhan yang kurang sehingga perlu dinonaktifkan.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sepanjang periode Tahun 2022 antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan pusdiklat dan balai diklat;
b. Merekapitulasi masukan-masukan pengembangan KLC 2.3 dari pusdiklat dan balai diklat, kemudian melakukan *clustering* dan pelapuran atas masukan-masukan tersebut;
c. Melaporkan aplikasi-aplikasi milik BPPK yang mempunyai pertumbuhan data sangat minim dan sudah berstatus inaktif kepada Pusintek dan telah dilakukan penonaktifan lima buah aplikasi.
d. Menyelesaikan pengembangan *back-end* KLC 2.3.
e. Menyusun dokumen manual penggunaan, skenario pengujian, formulir *User Acceptance Test* (UAT) dan hasilnya, notula pelaksanaan uji coba dan sosialisasi, serta berita acara serah terima aplikasi.
f. Berkoordinasi dengan tim SI PKN STAN dan menghitung tingkat utilitas aplikasi yang masih *co-location/ hosting* di luar.

Sedangkan rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan UIC Bagian TIKMP Sekretariat BPPK pada periode-periode berikutnya antara lain:

a. Menyusun tahapan proyek TIK strategis tahun 2023 dengan versi *waterfall* dan versi *agile* (berbasis *squad team*).
b. Menetapkan tahapan bersama tim proses bisnis dan menyampaikannya kepada Pusintek.
c. Mengimbau unit-unit kerja di lingkungan BPPK untuk menonaktifkan aplikasi *non-DC/ non-hosting* Kementerian Keuangan sebagai bentuk *security awareness*.
d. Membahas dan menyepakati rencana penonaktifan aplikasi lain yang memiliki TIDEE rendah, seperti aplikasi JDIH BPPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
87	100%	90	100	109,31

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp68.300.376 ,00 dari total biaya sebesar Rp182.514.000 ,00.

SS-11. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian Keuangan dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria Zona Integritasi–Wilayan Bebas Korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
11a-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,3	107,97	113,29

Indeks capaian untuk SS ini adalah **113,29**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif” ini adalah sebagai berikut.

11a-CP Indeks Integritas Organisasi

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal) dan menjadikan *pilot project* perwujudan *good governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). IKu ini mengukur dua komponen berikut:

a. Pemenuhan kriteria ZI-WBK berdasarkan penilaian KemenpanRB; dan
b. Survei persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal.

Pada periode Tahun 2022, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

11a-CP	SS: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	IKU: Indeks Integritas Organisasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	95,3	95,3	Max/TLKV

Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	107,97	107,97
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	113,29	113,29

Sepanjang periode Tahun 2022, tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan PIC dan Inspektorat Jenderal terkait persepsi integritas tahun sebelumnya.
b. Melakukan sosialisasi antikorupsi dengan melibatkan penyuluh antikorupsi dan duta transformasi di berbagai unit di lingkungan BPPK.
c. Memilih unit-unit di lingkungan BPPK yang akan dinilai sebagai unit ZI WBK pada tahun 2022.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi secara berkesinambungan.
b. Melakukan pemantauan unit yang dinilai ZI WBK.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Integritas Organisasi” ini dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra	Target 2022	Realisasi 2022
95,1	110,53	-	95,3	107,97

Adapun realisasi pembiayaan untuk IKU ini sampai dengan akhir periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.236.500 ,00 dari total biaya sebesar Rp88.729.000 ,00.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2022

Selama tahun 2022 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp389.276.595.167,00 atau 90,84% dari total pagu anggaran sebesar Rp428.521.434.000,00. Sebagai perbandingan, tahun 2021 BPPK melakukan realisasi sebesar Rp448.701.040.515,00 atau 88,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp507.716.657.000,00.

Tabel 3.11 berikut menunjukkan realisasi anggaran BPPK menurut jenis belanja.

Tabel 3.11: Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	52.752.502.000	51.711.867.000	98,03
52	Belanja Barang	319.040.393.000	281.372.899.000	88,19
53	Belanja Modal	56.728.539.000	56.191.829.000	99,05
	Total	**428.521.434.000**	**389.276.595.000**	**90,84**

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran BPPK selama beberapa tahun terakhir tersaji dalam **Gambar 3.2** berikut.

Gambar 3.2: Perbandingan Pagu (■) dan Realisasi (■) Anggaran Menurut Jenis Belanja

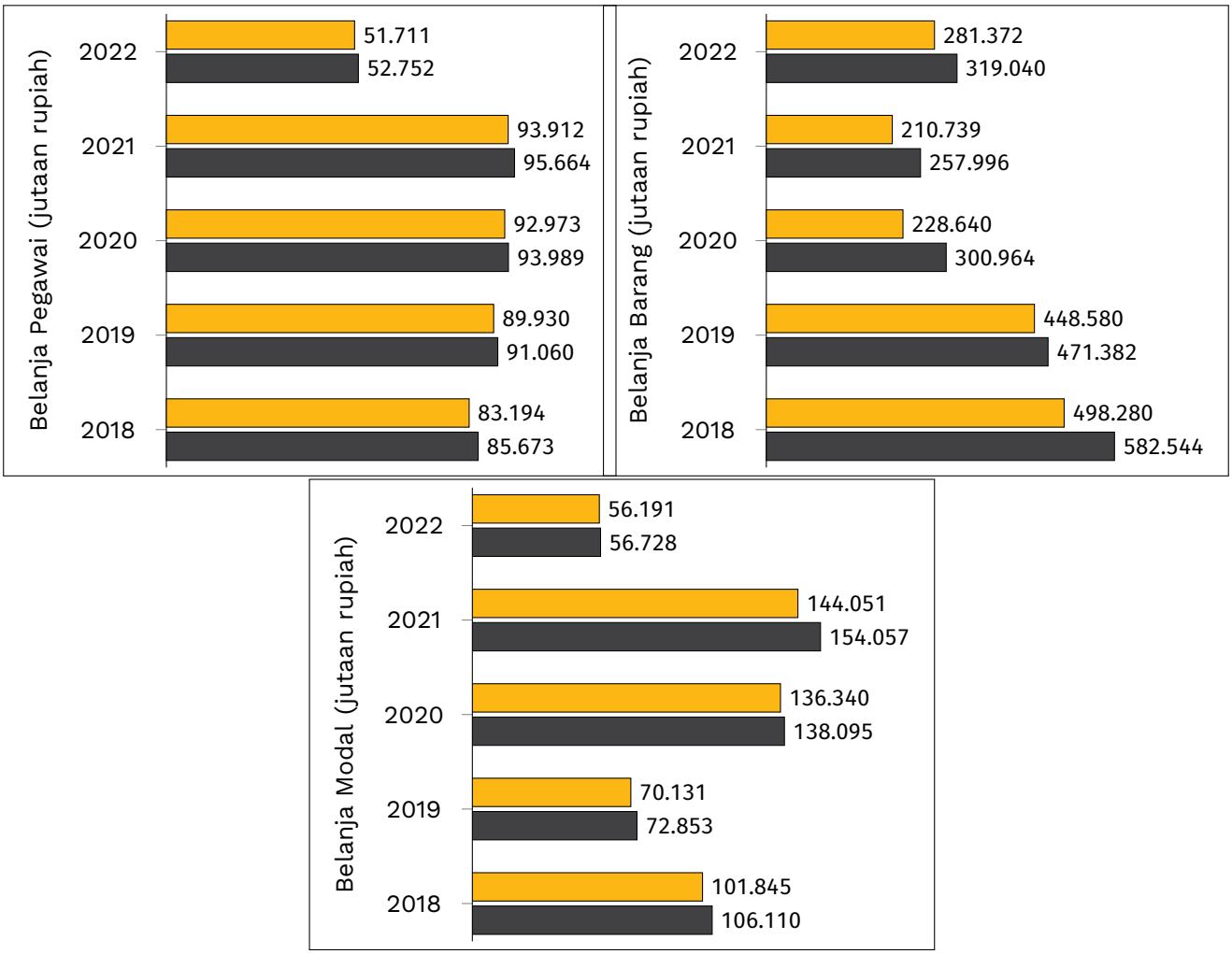

Realisasi anggaran BPPK periode Tahun 2022 menurut kegiatan tersaji dalam **Tabel 3.12** berikut.

Tabel 3.12: Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2022 Menurut Kegiatan

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	5.158.000	11,45
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	82.866.072.000	75.999.742.552	91,71
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	70.883.312.000	70.119.419.301	98,92
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	828.643.000	439.852.682	53,08
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	1.446.943.000	1.060.370.080	73,28
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	207.698.963.000	192.601.149.687	92,73
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	64.550.992.000	48.933.057.648	75,80
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	81.908.000	46.308.341	56,53
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	22.439.000	3.236.500	14,42
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	97.114.000	68.300.376	70,33
	Total	**428.521.434.000**	**389.276.595.167**	**90,84**

Dari **Tabel 3.12** terlihat bahwa pagu anggaran terbesar adalah pada kegiatan "Pengelolaan Organisasi dan SDM (4683)". Dari nilainya, kegiatan ini pula yang memiliki nilai realisasi anggaran yang paling besar, yaitu sebesar Rp192.601.149.687,00. Nilai sebesar ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pelaksanaan mutasi pegawai BPPK.

Sementara itu dari segi persentase capaian penyerapan anggaran, kegiatan "Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) (Kode: 4680)" memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 98,92%. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran terkait pengelolaan keuangan, BMN, umum, termasuk pengelolaan manajemen internal serta sarana dan prasarana internal pada Politeknik Keuangan Negara STAN memiliki efektivitas yang tinggi.

2. Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi

Permasalahan atau kendala yang dihadapi BPPK dalam merealisasikan anggaran sepanjang tahun anggaran 2022 adalah pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran unit-unit di lingkungan BPPK belum merata pada setiap periode triwulan. Penyerapan anggaran lebih banyak dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hal ini terlihat dengan besaran persentase realisasi anggaran pada triwulan pertama sebesar 20,27%,

triwulan kedua 17,25%, triwulan ketiga 20,10%, dan triwulan keempat 33,23%.

Proses integrasi anggaran pusdiklat-pusdiklat ke dalam anggaran Sekretariat Badan (satker BPPK 411868) sebagai salah satu langkah integrasi satker di lingkungan BPPK turut berperan dalam penyerapan yang tidak merata tersebut. Hal ini terjadi karena DIPA integrasi satker tersebut baru disahkan pada 24 Mei 2022 sehingga mengakibatkan terhambatnya realisasi atau penyerapan anggaran terutama pada periode triwulan kedua dan ketiga.

Nilai Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Eselon I BPPK adalah sebesar 96,09. Nilai tersebut berasal dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93,74 (bobot 40%) dan nilai SMART (Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 97,66 (bobot 60%).

Nilai IKPA belum optimal disebabkan oleh lima indikator, yaitu:

a. Deviasi RPD Halaman III DIPA, dengan nilai sebesar 82,78. Indikator ini belum mencapai nilai maksimal dikarenakan tingginya deviasi belanja satker BPPK Pusat (411868) pada triwulan kedua sebagai dampak dari proses integrasi anggaran satker. Selain itu, tingginya deviasi belanja modal pada triwulan ketiga juga turun andil dalam ketidakmaksimalan nilai indikator ini.
b. Penyerapan anggaran, dengan nilai sebesar 82,44. Indikator ini belum optimal karena rencana penyerapan anggaran triwulanan yang disusun satker BPPK masih di bawah target penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam perhitungan IKPA. Pada indikator ini juga terdapat penyesuaian perhitungan yaitu dengan mengecualikan blokir *automatic adjustment* dari pagu DIPA.
c. Belanja kontraktual, dengan nilai sebesar 92,18. Indikator ini belum mencapai nilai maksimal karena hal-hal berikut.
    - Terdapat 2 buah kontrak Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial yang terlambat disampaikan ke KPPN;
    - Terdapat 7 buah kontrak belanja modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan ketiga;
    - Terdapat 17 buah kontrak belanja modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan keempat.
d. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP), dengan nilai sebesar 97,63. Indikator ini belum mencapai nilai maksimal karena hal-hal berikut.
    a. Keterlambatan Ganti UP (GUP)/ PTUP pada satker BDK Pekanbaru di bulan Maret 2022 dan satker BPPK Pusat di bulan November 2022;
    b. Terdapat setoran sisa TUP pada Pusdiklat Bea dan Cukai (Maret 2022), Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Februari, Maret, dan April 2022), BPPK Pusat (Juni, Juli, September, Oktober, November, dan Desember 2022), dan BDK Denpasar (Desember 2022);
    c. Terdapat nilai persentase GUP yang belum optimal pada satker BPPK Pusat, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BD Kepemimpinan.
e. Capaian *Output*, dengan nilai sebesar 99,98. Indikator ini belum mencapai nilai maksimal pada *Rincian Output* (RO) Pembelajaran Digital pada unit kerja Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, satker BDK Malang, dan satker BD Kepemimpinan.

Adapun nilai SMART belum optimal disebabkan oleh tiga indikator sebagai berikut.

a. Penyerapan, dengan nilai sebesar 90,84. Indikator penyerapan ini belum mencapai nilai maksimal karena banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari yang dianggarkan.
b. Rata-rata NKA satker, dengan nilai sebesar 95,67.
c. Konsistensi, dengan nilai sebesar 99,11. Indikator konsistensi ini belum mencapai nilai maksimal karena realisasi anggaran yang tidak tercapai 100% pada Desember 2022.

D. Realisasi *Output*

1. Realisasi *Output* BPPK Periode Tahun 2022

Pada tahun 2022 ini terdapat 63 *Rincian Output* (RO) yang dimiliki oleh BPPK. Realisasi *Output* Kegiatan BPPK tahun 2022 tersebut secara terperinci tercantum dalam **Tabel 3.13** berikut.

Tabel 3.13: Realisasi *Output* BPPK Tahun 2022

Kode	Uraian	Target 2022	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian
4678	***Legislasi dan Litigasi***				
4678.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Perkara	2	200,00
4679	***Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum***				
4679.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	1	Dokumen	1	100,00
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	18	Bulan Layanan	18	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	172	Bulan Layanan	172	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	175	Bulan Layanan	175	100,00
4679.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
EBB.110	Kendaraan Bermotor	0	Unit	5	100,00
EBB.111	Peralatan Fasilitas Perkantoran	136	Unit	551	198,20
EBB.113	Gedung/Bangunan	4.202	M2	4.202	100,00
4679.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**				

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target 2022	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian
EBD.106	Dokumen Perbendaharaan Unit	1	Dokumen	2	200,00
EBD.107	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1	Dokumen	1	100,00
EBD.108	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	1	Dokumen	1	100,00
EBD.109	Laporan Keuangan Unit	1	Laporan	1	100,00
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Laporan	1	100,00
4680	***Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum***				
4680.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Bulan Layanan	12	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	12	Bulan Layanan	12	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	12	100,00
4680.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
EBB.111	Peralatan Fasilitas Perkantoran	102	Unit	102	100,00
EBB.113	Gedung/Bangunan	20.000	M2	20.000	100,00
4681	***Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik***				
4681.BMB	**Komunikasi Publik**				
BMB.201	Jurnal	2	Volume	2	100,00
BMB.202	Corpu TV	1	Liputan	1	100,00
BMB.203	Publikasi Media Cetak	1	Cetak	1	100,00
BMB.204	Strategi Komunikasi	1	Strategi	1	100,00
BMB.205	Pameran/Eksibisi	1	Kegiatan	2	200,00
4682	***Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik***				
4682.BME	**Komunikasi Publik**				
BMB.201	Jurnal	5	Volume	8	160,00
BMB.206	Layanan Kepustakaan	12	Bulan Layanan	12	100,00
4683	***Pengelolaan Organisasi dan SDM***				
4683.AAG	**Peraturan Menteri**				
AAG.301	Peraturan/Kebijakan Terkait Organisasi	1	Peraturan Menteri	7	700,00
4683.AAH	**Peraturan lainnya**				

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target 2022	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian
AAH.302	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1	Peraturan	2	200,00
AAH.303	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	1	Peraturan	4	400,00
4683.ABA	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**				
ABA.304	Kajian Akademis	26	Kajian	44	146,66
4683.DCF	**Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan**				
DCF.313	Program dan Materi Pembelajaran	155	Program	421	271,61
DCF.314	Pembelajaran Digital	4.069.589	Jamlator	5.860.090	144,49
DCF.315	Pembelajaran Klasikal	857.344	Jamlator	937.912	113,91
DCF.316	Sertifikasi Kompetensi	288	Peserta	1.547	599,61
DCF.317	Alat Uji	6	Alat	6	100,00
DCF.318	Manajemen Pengetahuan	571	Aset Intelektual	815	148,45
DCF.319	Karyasiswa Beasiswa	413	Peserta	423	102,42
DCF.320	Optimalisasi Data Analytics dalam Implementasi Kebijakan Fiskal	14.000	Jamlator	35.909	256,49
DCF.321	Pembelajaran Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara antara DJP-DJBC-DJA	11.305	Jamlator	12.710	112,42
DCF.322	Pembelajaran Mirror Analysis: Customs Risk Analysis and Fraud Detection	2.400	Jamlator	2.760	115,00
DCF.323	Pembelajaran Digital Terintegrasi (Intergrated Digital Learning) Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam Rangka Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	150.000	Jamlator	141.076	126,71
DCF.324	E-Learning Optimalisasi BMN bagi Kuasa Pengguna Barang	208.950	Jamlator	23.310	109,44
DCF.325	E-learning Penguatan Kesadaran Bela Negara	370.800	Jamlator	580.545	156,56
4683.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.305	Administrasi Kepegawaian	1.327	Pegawai	1.327	100,00

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target 2022	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian
EBA.306	Pengelolaan Jafung	365	Pejabat Fungsional	1.053	288,49
EBA.307	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	100,00
EBA.308	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara	1	Akreditasi	1	100,00
EBA.309	Learning Organization	1	Laporan	1	100,00
EBA.310	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	1	Rekomendasi	1	100,00
EBA.311	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1	Rekomendasi	2	200,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	170	Bulan Layanan	170	100,00
4683.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**				
EBC.312	Pengembangan SDM	1.866	Pegawai	5.382	288,42
4684	***Pengelolaan Organisasi dan SDM***				
4684.DBA	**Pendidikan Tinggi**				
DBA.326	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	2.975	Mahasiswa	2.975	100,00
DBA.327	Penerimaan Mahasiswa Baru	5.000	Peserta	8.947	178,94
DBA.328	Program Pengabdian Masyarakat	40	Program	123	307,50
DBA.329	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	60	Penelitian	76	126,66
DBA.330	Transformasi Akademik melalui Pengembangan Kurikulum Akademik, Pembangunan Karakter, dan Transformasi Dosen	275	Mahasiswa	750	100,00
DBA.331	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	250	Peserta	362	144,80
4684.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.307	Penjaminan Mutu	1	Laporan	2	200,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	12	100,00
4684.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**				
EBC.312	Pengembangan SDM	150	Pegawai	251	167,33
4685	***Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal***				
4685.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.401	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	Rekomendasi	1	100,00

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target 2022	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian
4686	***Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal***				
4686.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
EBA.401	Rekomendasi Kepatuhan Internal	4	Rekomendasi	4	100,00
4687	***Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi***				
4687.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**				
FAB.501	KLC	1	Sistem Informasi	1	100,00

2. Penjelasan Atas Realisasi *Output* BPPK Periode Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 ini tidak terdapat permasalahan ataupun kendala dalam merealisasikan *output* kegiatan BPPK. Keseluruhan dari 63 RO yang dimiliki BPPK tahun 2022 tercapai dengan rata-rata nilai capaian sebesar 156,57%.

E. Kinerja Lain-Lain

1. Inisiatif Strategis BPPK

Pada tahun 2022 BPPK memiliki satu buah IS, yaitu:

Penguatan Implementasi Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran Terintegrasi Untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan Sebagai *Learning Organization*

Dalam rangka meningkatkan implementasi *learning organization* (LO) di lingkungan BPPK, perlu dilakukan akselerasi dari implementasi manajemen pengetahuan dan praktik pembelajaran terintegrasi. IS ini memiliki periode pelaksanaan dari Januari s.d. Desember 2022. Adapun *output* yang diharapkan adalah terwujudnya Kementerian Keuangan sebagai LO dengan tingkat implementasi LO tinggi (80%), diukur tahunan.

Sepanjang tahun 2022, tidak ditemukan kendala atau akar masalah yang dapat menghambat pencapaian IS ini. Adapun realisasi LO Kementerian Keuangan s.d. akhir tahun 2022 adalah sebesar 91,01. Sementara itu realisasi LO tingkat BPPK adalah sebesar 92,97.

Dalam melakukan IS ini, BPPK tidak menggunakan anggaran (realisasi anggaran Rp0,00).

Sementara itu rencana aksi untuk dapat dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

a. Implementasi LO tahun 2023 di BPPK.
b. Asistensi implementasi LO tahun 2023 untuk unit eselon I lain.
c. Pengukuran tingkat implementasi LO.

2. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kementerian Keuangan adalah penguatan pemahaman dan komitmen *stakeholder* baik internal maupun eksternal, peningkatan kebijakan yang responsif gender, dan peningkatan kualitas layanan responsif gender.

Implementasi PUG dilakukan dengan menggunakan seperangkat komponen kunci yang disebut 7 (tujuh) Prasyarat PUG. Ketujuh prasyarat tersebut sekaligus pelaksanaannya di BPPK sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Komitmen Pimpinan

Wujud komitmen pimpinan dalam bentuk kegiatan terdiri atas hal-hal berikut.

a. Pembuatan Renstra BPPK Tahun 2020–2024.

   Pimpinan BPPK mendukung pelaksanaan pembuatan Renstra ini terkait terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan responsif gender dengan mengadopsi teknologi informasi termutakhir demi terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.

b. Pembuatan Renja BPPK Tahun 2023.

   Pada Renja BPPK Tahun 2023, telah di-*tagging* ARG di RO Pembelajaran Digital, RO Pembelajaran Klasikal, dan RO Karyasiswa Beasiswa pada aplikasi KRISNA.

c. Penetapan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-108/PP/2019 tentang Panduan Implementasi PUG di Lingkungan BPPK.

   Kepala BPPK mengeluarkan panduan implementasi PUG di lingkungan BPPK dalam upaya memastikan bahwa PUG dapat diimplementasikan di seluruh unit kerja di lingkungan BPPK.

d. Penyusunan Dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) pada seluruh unit di BPPK.

   Pimpinan BPPK memberikan arahan kepada seluruh unit di lingkungan BPPK untuk melengkapi dokumen pendukung berupa GBS dalam usulan Pagu Indikatif TA 2023.

e. Penetapan Tim Penggerak dan Rencana Kerja Implementasi PUG di Lingkungan BPPK.

   Komitmen pimpinan berikutnya ditandai dengan membentuk Tim Penggerak Implementasi PUG di Lingkungan BPPK Tahun 2022 melalui penetapan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-103/PP/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Implementasi PUG di Lingkungan BPPK Tahun 2022.

Selain itu, wujud komitmen pimpinan dalam bentuk kegiatan meliputi hal-hal berikut.

a. Maklumat Implementasi PUG di unit pusat dan unit daerah BPPK

   Penandatanganan dan penetapan maklumat implementasi PUG di lingkungan Pusdiklat KNPK dilakukan pada 29 Juni 2022. Adapun penandatanganan dan penetapan maklumat implementasi PUG di lingkungan Sekretariat Badan dilakukan pada 9 Agustus 2022. Selain itu, terdapat pula penetapan maklumat implementasi PUG di lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang.

b. Penunjukan duta PUG pada unit pusat di lingkungan BPPK

   Duta PUG di lingkungan BPPK telah ditunjuk melalui penetapan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-104/PP/2022 tentang Penunjukan Duta PUG di Lingkungan BPPK TA 2022 tanggal 30 Juni 2022.

c. Penyelenggaraan Pelatihan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Dalam implementasi PUG Kementerian Keuangan tahun 2022 ini BPPK diberi beberapa tangung jawab, di antaranya adalah menjadi koordinator dalam kegiatan penguatan kualitas media edukasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui penyediaan media pembelajaran terkait PPRG BA 015 dan pembelajaran lanjutan terkait pengolahan data terpilah dan analisis gender dalam PPRG (*gender analysis and budgeting*). Kedua kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Selain itu, tanggung jawab lainnya adalah sebagai koordinator dalam kegiatan integrasi isu *woman leadership* dalam media pembelajaran mengenai kepemimpinan di Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan *e-learning* terkait PUG sejak tahun 2020. *E-learning* tersebut dapat diakses oleh lebih banyak peserta dibandingkan dengan pelatihan klasikal. Hal tersebut tentu dapat memberikan dampak yang lebih luas demi terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia. Salah satu program *e-learning* terkait PUG ini adalah *E-Learning* PPRG yang diselenggarakan secara reguler tiap tahunnya. Tahun 2022 ini *E-Learning* PPRG diselenggarakan pada Juli s.d. Agustus 2022 dengan total peserta sebanyak 2.030 orang yang terbagi ke dalam empat angkatan. Para peserta merupakan perwakilan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain *e-learning*, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Implementasi PUG dan PPRG juga telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 295 orang dengan komposisi 56% pria dan 44% wanita. Pelaksanaan *e-learning* maupun PJJ ini melibatkan berbagai pihak yang berasal dari lintas instansi dalam Kementerian Keuangan, termasuk dalam hal penyediaan materi, pengajar, dan narasumber.

Kebijakan yang Responsif Gender

Kebijakan responsif gender yang diwujudkan BPPK dalam setiap pelatihan, baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun digital, di antaranya adalah kebijakan untuk memberikan dispensasi fisik bagi peserta yang sedang hamil maupun sakit, pemberian kamar atau kelas di lantai bawah bagi peserta yang lanjut usia maupun hamil, dan pemberian menu khusus kepada peserta pelatihan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dalam pelatihan-pelatihan secara klasikal, BPPK juga memberikan kesempatan kepada peserta yang berstatus sebagai ibu menyusui untuk dapat memberikan ASI kepada bayinya tanpa kendala dengan penyediaan ruang laktasi berikut sarana dan prasarananya. Selain itu peserta tersebut juga diperbolehkan membawa serta bayi dan pengasuhnya untuk pelatihan klasikal yang diharuskan menginap.

BPPK juga menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender, di antaranya adalah toilet untuk penyandang disabilitas, tempat parkir prioritas, dan rampa dan lift yang ramah untuk penyandang disabilitas. Selain itu, BPPK juga menyediakan ruang bermain anak, tempat penitipan anak, dan toilet terpisah laki-laki dan perempuan. Kebijakan responsif gender ini juga diwujudkan dalam pemberian kesempatan beribadah sesuai dengan zona waktu peserta di saat penyelenggaraan pelatihan secara daring.

Kelembagaan PUG

Secara kelembagaan, BPPK telah membentuk Tim Penggerak Implementasi PUG di Lingkungan BPPK Tahun 2022 melalui penetapan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-103/PP/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Implementasi PUG di Lingkungan BPPK Tahun 2022. Selain itu, BPPK juga melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Implementasi PUG Kementerian Keuangan Tahun 2022 pada 22 Juni 2022 dengan mengundang narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal. Dalam FGD tersebut dibahas topik mengenai implementasi PUG dan pengawasan PUG di Kementerian Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM BPPK tahun 2022 terbagi ke dalam:

Tabel 3.14: SDM BPPK Menurut Level Unit

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon I	1	0
2	Eselon II	5	1
3	Eselon III	29	8
4	Eselon IV	77	32
5	Non-Eselon	4	2
6	Fungsional Tertentu	282	72
7	Fungsional Umum	471	281
8	CPNS	8	12
	Total	**877**	**408**

Adapun SDM berdasarkan pendidikan terdiri atas:

Tabel 3.15: SDM BPPK Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S-3	36	4
2	S-2	316	114
3	S-1/D-4	320	180
4	D-3	119	84
5	D-1	18	8
6	SMA/SMP/SD	68	18
	Total	**877**	**408**

Data Terpilah (Menurut Jenis Kelamin)

Tabel 3.16: Data Terpilah PUG (Menurut Jenis Kelamin)

No	Kegiatan	Sertifikat		Non-Sertifikat	
		L	P	L	P
1	Advokasi PUG bagi Pimpinan	0	0	1	0
2	Sosialisasi/ bimbingan teknis/ *workshop*/ pelatihan PUG yang diselenggarakan oleh Tim PUG Kementerian Keuangan/ BPPK	30	17	0	0
3	Sosialisasi/ *in-house training*/ gugus kendali mutu yang diselenggarakan oleh internal unit	0	0	258	221
4	Sosialisasi/ bimbingan teknis/ *workshop*/ pelatihan PUG yang diselenggarakan selain dari Tim PUG Kementerian Keuangan/ BPPK	0	0	0	2

Alat Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*/ GAP)

Tahun 2023 BPPK memiliki dua kebijakan atau program yang dilakukan analisis/ GAP. Kedua kebijakan atau program tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pengembangan UMKM melalui Program Pembelajaran.

Rencana aksi yang telah direncanakan adalah mengadakan Program Pengembangan UMKM melalui pelatihan dalam bentuk *webinar* dan/atau *e-learning open access* dengan materi mencakup perpajakan untuk UMKM, manajemen keuangan untuk UMKM, dan pembiayaan ultra mikro untuk UMKM. Adapun indikator kinerja program ini adalah berupa meningkatnya pemahaman peserta pelatihan tentang kebijakan Kementerian Keuangan terkait UMKM dan dapat menerapkan manajemen keuangan UMKM yang baik. Dengan *output* berupa pengembangan UMKM melalui program pembelajaran, program ini dianggarkan pembiayaan sebesar Rp182.020.000,00.

b. Seminar Ketahanan Keluarga

Rencana aksi yang telah direncanakan adalah menyelenggarakan Seminar Ketahanan Keluarga dan menyelenggarakan pembinaan mental bagi pegawai BPPK. Adapun indikator kinerja program ini adalah berupa meningkatnya *awareness* pegawai BPPK atas konsep kesetaraan dan keadilan gender dan menurunnya angka izin perceraian yang diajukan oleh pegawai. Dengan *output* berupa administrasi kepegawaian, program ini memiliki anggaran sebesar Rp57.100.000,00.

Partisipasi Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh BPPK terkait dengan implementasi PUG.

a. Keikutsertaan BPPK dalam kegiatan PROSPERA.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- Pelaksanaan *knowledge sharing* terkait *Leadership and Managerial Development Program* di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.
- Pelaksanaan FGD *Inclusive and Transformative Leadership Training Program*.
- Pelaksanaan kegiatan pengiriman widyaiswara sebagai observer pada *Workshop Women Leadership Initiative* oleh Prospera.

b. Penyelenggaraan Kemenkeu *Corpu Talk* (KCT) dengan tema "Kartini Masa Kini, Produktif dan Menginspirasi".

Kepala BPPK memberikan *opening speech* bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dalam KCT yang diselenggarakan pada 19 April 2022 ini. Dalam acara ini BPPK berkolaborasi dengan melibatkan narasumber internal Kementerian Keuangan, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ayu Sukorini) dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (Oza Olavia) serta narasumber eksternal, yaitu *Co-Chair* W20 dan CEO XL Axiata (Dian Siswarini).

c. Pembentukan Pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa *Center*.

PKN STAN menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai salah satu upaya berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (*Sustainable Development Goals/SDGs* Desa). Kerja sama ini merupakan komitmen PKN STAN dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam upaya pengawalan Dana Desa agar sesuai dengan pencapaian SDGs Desa.

d. Program Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada ataupun kegiatan lain yang bermanfaat dengan melibatkan Dosen PKN STAN sebagai penggerak kegiatan.

3. Studi Banding/ *Benchmarking* Oleh Instansi Lain

Sepanjang tahun 2022 BPPK menerima kunjungan baik secara virtual (pertemuan daring) maupun langsung (pertemuan luring) dari berbagai instansi dalam rangka studi banding dan penolokukuran (*benchmarking*) terkait implementasi Kementerian Keuangan *corporate university*, implementasi pembelajaran *e-learning*, *activity based workplace*, manajemen pengetahuan, keorganisasian, maupun implementasi pengelolaan SDM secara umum.

Perincian pelaksanaan studi banding/ *benchmarking* tersebut terdapat dalam **Tabel 3.17** berikut.

Tabel 3.17: Perincian Kegiatan Studi Banding/ *Benchmarking* oleh Instansi Lain

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri	4 Januari 2022	Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kebijakan, Program, dan Infrastruktur)
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Kependidikan dan Keagamaan, Kementerian Agama	21 Januari 2022	*Massive Online Open Courses* (MOOC)
3	KPKNL Bontang	24 Januari 2022	*Activity Based Workplace*
4	Pusdiklat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan	27 Januari 2022	Alur pengembangan kompetensi ASN di Kemenkeu, khususnya terkait pelatihan, Integrasi antara pelatihan dan pengembangan karier pegawai, Sistem pembelajaran dan metode evaluasi pada pelatihan yang dijalankan saat ini, Media-media pembelajaran yang tersedia saat ini dan pemanfaatannya, Informasi tentang LMS dan pengelolaannya, dan *Grand design* pengembangan SDM (terkait pelatihan).
5	Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama	3 Februari 2022	Transformasi Pelatihan
6	Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama	2 Maret 2022	Struktur dan Tugas Komponen *Corporate University* dan Bimbingan Penyusunan *Grand Design Corporate University*
7	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Kesehatan	4 Maret 2022	Metode dan Strategi Pengembangan Kompetensi ASN melalui *Corporate University*
8	Bank Indonesia	8 Maret 2022	FGD Pengembangan dan Pengelolaan *Knowledge Management* (*Sharing* Implementasi *Knowledge Management System*)
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	15 Maret 2022	Fasilitasi Program Pengembangan Kompetensi

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri	18 Maret 2022	*Best Practice* Pembangunan Kementerian Keuangan *Corporate University*
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur	28 Maret 2022	*Corporate University*
12	Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	31 Maret dan 1 April 2022	*Corporate University*, Pembelajaran Terintegrasi, Pengelolaan SDM, dan Pembelajaran Terintegrasi.
13	Pusdiklat BMKG	7 April 2022	*Talkshow* Dewan Pembelajar BMKG Corpu dan Ekspose Inovasi Aksi Perubahan Alumni PKA-PKP
14	Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan	14 April 2022	Pengembangan *E-Learning* di Bidang Kesehatan Tradisional
15	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Kesehatan	19 April 2022	Pengembangan Prototipe Portal Pembelajaran Kemenkes *Corporate University*
16	Pusdiklat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan	25 April 2022	FGD Penyusunan Pedoman Pelatihan
17	Pusdiklat Kementerian Luar Negeri	21 Mei 2022	Jabatan Fungsional
18	Pusdiklat Pengawasan BPKP	25 Mei 2022	*Massive Online Open Courses* (MOOC)
19	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13 Juni 2022	Monitoring dan Evaluasi Pascapembelajaran
20	Kementerian ESDM	15 Juni 2022	Kementerian Keuangan *Corporate University*
21	Pusdiklat Sekretariat DPR RI	22 Juni 2022	Organisasi
22	Pusdiklat Sekretariat DPR RI	29 Juni 2022	Organisasi
23	Pusdiklat Teknis Peradilan, Mahkamah Agung RI	30 Juni 2022	Pengembangan Penjaminan Mutu dan Layanan Inovasi Penyelenggaraan Pelatihan
24	Pusdiklat Kementerian BKPM	30 Juni 2022	Implementasi Pembelajaran Terintegrasi
25	Pusdiklat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan	7 Juli 2022	Sistem *database* pengajar, Sistem evaluasi pengajar, dan Sistem *database* peserta pelatihan.
26	Badan Kepegawaian dan SDM Kota Bandung	20 Juli 2022	Kementerian Keuangan *Corporate University*
27	Badan Pengembangan SDM Provinsi DKI Jakarta	27 Juli 2022	Pengelolaan Tugas Belajar, Pegawai Magang
28	Badan Pengembangan SDM, Kementerian Perindustrian	1 Agustus 2022	Strategi dan *Roadmap* Pengembangan Kementerian Keuangan *Corporate University*

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
29	Kementerian Komunikasi dan Informatika	22 Agustus 2022	Pengembangan KLC
30	Badan Pengembangan SDM Provinsi DKI Jakarta	25 Agustus, 29 Agustus, 1 September, 5 September 2022	Proses *Learning Need Analysis* (LNA), LCM *Meeting*, Proses *Design and Development* Materi Pembelajaran dengan pendekatan ADDIE, Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 70:20:10, Proses *Delivery and Deployment*, Proses *Learning Impact Measurement*, *Digital Leaning* dan *Knowledge Management*, dan SDM Tim *Learning*.
31	Baznas	23 September 2022	*Corporate University*
32	Biro Organisasi dan SDM, Kementerian Perdagangan	26 September 2022	Analisis Kebutuhan Diklat
33	Pusdiklat Pengembangan SDM, Kementerian Ketenagakerjaan	3 Oktober 2022	*Corporate University*
34	Ombudsman Republik Indonesia	5 Oktober 2022	Manajemen Pengetahuan
35	Pusdiklat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan	11 November 2022	Evaluasi Pascapembelajaran
36	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	11 November 2022	Manajemen Pengetahuan
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bali	24 November 2022	Kementerian Keuangan *Corporate University*
38	PT Hutama Karya (Persero)	22 Desember 2022	Pembentukan dan Pengelolaan *Center of Excellence*

Gambar 3.3: Kunjungan *Benchmarking* dari Kementerian Luar Negeri Terkait Jabatan Fungsional

Gambar 3.4: Kunjungan *Benchmarking* dari PT Hutama Karya (Persero) Terkait Implementasi Kementerian Keuangan *corporate university*

Gambar 3.5: Penganugerahan BPPK pada Top Digital Awards 2022

Gambar 3.6: Penyerahan Predikat ZI WBBM pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Kemenkeu Tahun 2022

4. Penghargaan

Sepanjang tahun 2022 BPPK menerima berbagai penghargaan, baik dari internal Kementerian Keuangan maupun dari lembaga-lembaga lain. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Peringkat 10 Besar Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022 untuk Kemenkeu *Corporate University*.
b. PPID Tingkat I Kategori Informatif Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2022.
c. Juara I (Tim Pusdiklat Pajak), Juara II (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharan), dan Juara III (Tim Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial) pada Kompetisi Pengembangan Materi *Microlearning* LAN Awards 2022.
d. Terbaik II Pemilihan Widyaiswara Berprestasi LAN Awards 2022 diterima oleh Yasser Arafat Usman, widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
e. Penghargaan Nagara Dana Ksatria 2022 Kategori Inspirasi (Tim) diberikan kepada Tim Pengembangan KLC, Sekretariat BPPK.
f. Penghargaan Nagara Dana Ksatria 2022 Kategori Kolaboratif diberikan kepada Wawan Ismawandi, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran, Pusdiklat Keuangan Umum.
g. Penghargaan Nagara Dana Abyakta 2022 Bidang Budaya Organisasi diraih oleh Pusdiklat Keuangan Umum dan Balai Diklat Keuangan Malang.
h. Juara II Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan Tahun 2022 Kategori Unit Vertikal diraih oleh Balai Diklat Keuangan Malang.
i. *Top Digital Implementation* 2022 #Level Stars 5 pada TOP Digital Awards 2022. Pada gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh majalah It Works tersebut BPPK meraih penghargaan atas Kemenkeu *Learning Center* Generasi Kedua (KLC2).
j. *Top Leader On Digital Implementation* 2022 pada TOP Digital Awards 2022 diberikan kepada Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, dalam komitmen mengimplementasikan pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan dalam upaya mewujudkan *Learning Organization* di Kemenkeu.
k. Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari Kementerian PAN-RB diraih oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Balai Diklat Keuangan Medan, Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Balai Diklat Keuangan Palembang, Balai Diklat Keuangan Malang, dan Balai Diklat Keuangan Denpasar.
l. Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dari Kementerian PAN-RB diraih oleh Pusdiklat Keuangan Umum.

BAB 4 | Penutup

Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.

BAB 4 | Penutup

Laporan Kinerja BPPK Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi BPPK menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Untuk menjalankan perannya tersebut BPPK didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Selama periode Tahun 2022 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp389.276.595.167,00 atau 90,84% dari total pagu anggaran sebesar Rp428.521.434.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya terkandung 63 rincian *output* (RO) dalam 10 kegiatan sebagai berikut.

a. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp45.048.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp5.158.000,00 atau tercapai sebesar 11,45%.
b. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp82.866.072.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp75.999.742.552,00 atau tercapai sebesar 91,71%.
c. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp70.883.312.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp70.119.419.301,00 atau tercapai sebesar 98,92%.
d. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp828.643.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp439.852.682,00 atau tercapai sebesar 53,08%.
e. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.446.943.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.060.370.080,00 atau tercapai sebesar 73,28%.
f. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp207.698.963.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp192.601.149.687,00 atau tercapai sebesar 92,73%.

g. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp64.550.992.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp48.933.057.648,00 atau tercapai sebesar 75,80%.
h. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.908.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp46.308.341,00 atau tercapai sebesar 56,53%.
i. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp22.439.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp3.236.500,00 atau tercapai sebesar 14,42%.
j. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki pagu anggaran sebesar Rp97.114.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp68.300.376,00 atau tercapai sebesar 70,33%.

Laporan Kinerja juga ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK selama tahun 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Sebanyak 22 IKU dari total 22 IKU pada tahun 2022 telah tercapai dan melampaui targetnya. Adapun keseluruhan IKU tersebut antara lain:

a. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (realisasi sebesar 91,01 dari target 85 (skala 100)).
b. Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi (realisasi sebesar 86,84 dari target 80).
c. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya (realisasi sebesar 88,78% dari target 82%).
d. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya (realisasi sebesar 98,85% dari target 85%).
e. Persentase *Communique* G-20 Usulan Indonesia yang Disepakati (realisasi sebesar 94,05% dari target 70).
f. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (realisasi sebesar 88,69 dari target 85).
g. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (realisasi sebesar 4,8 dari target 4,45).
h. Indeks Kualitas Penelitian (realisasi sebesar 546,5 dari target 335).
i. Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan (realisasi sebesar 99,41 dari target 80%).
j. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran (realisasi sebesar 5 dari target 4).
k. Tingkat Validasi Program Pembelajaran (realisasi sebesar 120 dari target 100).
l. Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi (realisasi sebesar 99,32% dari target 85%).
m. Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC (realisasi sebesar 115,29% dari target 100%).
n. Tingkat Kematangan *Knowledge Management* (realisasi sebesar 4 dari target 3).
o. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM (realisasi sebesar 115,13 dari target 100).
p. Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu (realisasi sebesar 94,60% dari target 92%).
q. Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu (realisasi sebesar 120 dari target 100).
r. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (realisasi sebesar 3,91 dari target 3,55).
s. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 (realisasi sebesar 112,78 dari target 100).
t. Tingkat Penggunaan Aset Bersama (realisasi sebesar 110% dari target 25).
u. Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK (realisasi sebesar 109,31 dari target 100).
v. Indeks Integritas Organisasi (realisasi sebesar 107,97 dari target 95,3).

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Lampiran

Perjanjian Kinerja 118
Adendum Perjanjian Kinerja 126

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 11/KK/2022
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

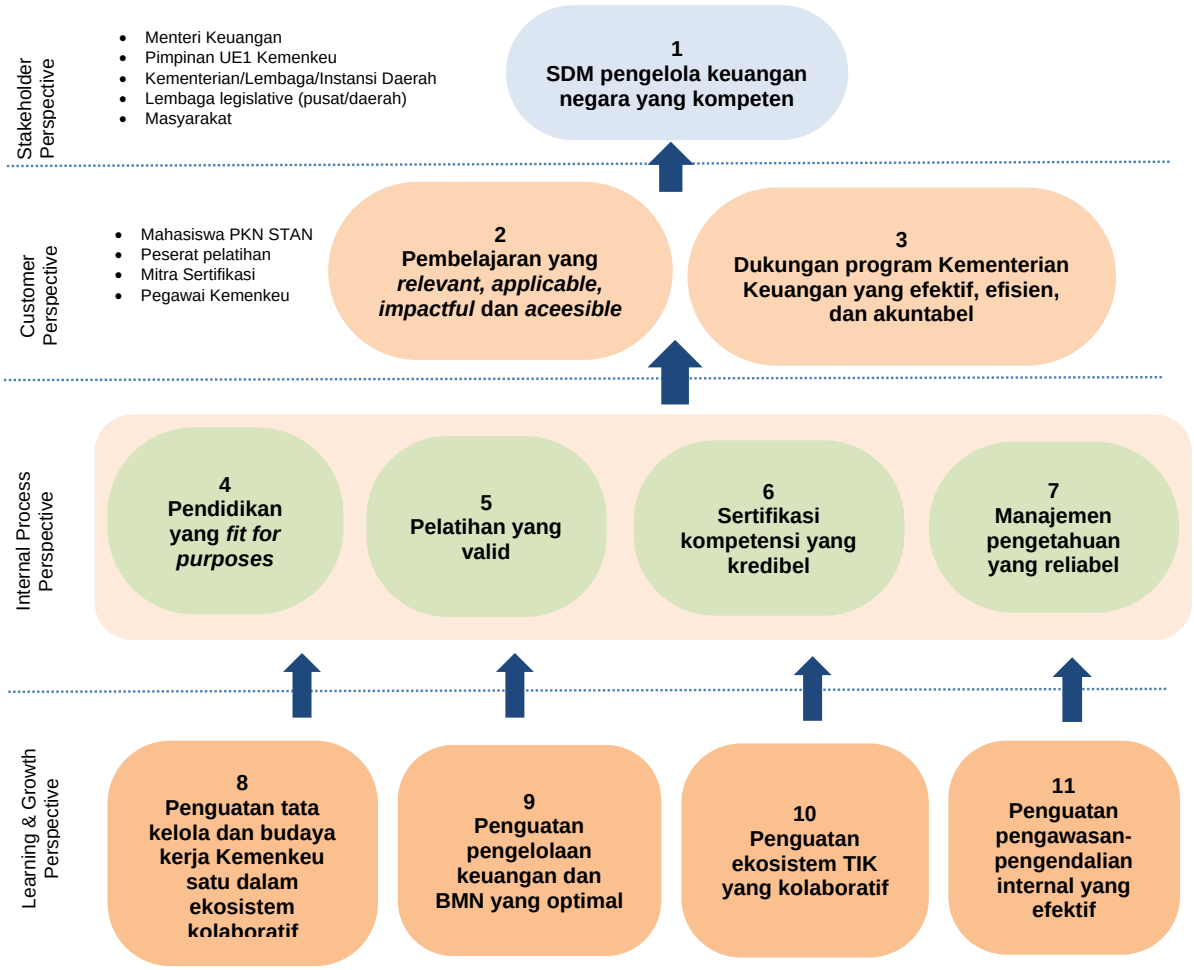

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten	1a-CP Tingkat implementasi learning organization	85
		1b-CP Tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi	80
		1c-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	82
2	Pembelajaran yang relevant, applicable, impactful dan accessible	2a-N Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja	85
3	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	3a-CP Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70
		3b-CP Nilai evaluasi reformasi birokrasi	85
		3c-N Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45
4	Pendidikan yang fit for purpose	4a-N Indeks kualiitas penelitian	335
		4b-N Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	80
5	Pelatihan yang valid	5a-N Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4
		5b-N Tingkat validasi program pembelajaran	100
6	Sertifikasi kompetensi yang kredibel	6a-N Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	85
7	Manajemen pengetahuan yang reliable	7a-N Tingkat pemanfaatan knowledge pata platform KLC	100
		7b-N Tingkat kematangan knowledge management	3
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-CP Tingkat kualitas pngelolaan SDM	100
		8b-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92
		8c-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
		8d-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b-CP Tingkat penggunaan aset bersama	25
10	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	10a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
11	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	11a-CP Indeks integritas organisasi	95,3

Program/ Kegiatan		**Anggaran**
Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**485.142.381.000,00**
1. Legislasi dan litigasi	Rp	45.048.000,00
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp	148.649.443.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1.716.650.000,00
4. Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp	334.469.997.000,00
5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp	182.514.000,00
6. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp	88.729.000,00

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten							
1a-CP	Tingkat implementasi learning organization						85	85
1b-CP	Tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi						80	80
1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya		82	82		82	82	82
2	Pembelajaran yang relevant, applicable, impactful dan accessible							
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja		85	85		85	85	85
3	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel							
3a-CP	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70		70	70	70	70	70
3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi		85	85		85		85
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan						4,45	4,45
4	Pendidikan yang fit for purpose							
4a-N	Indeks kualiitas penelitian						335	335
4b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan						80	80
5	Pelatihan yang valid							
5a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran		4	4		4	4	4
5b-N	Tingkat validasi program pembelajaran		100	100		100	100	100
6	Sertifikasi kompetensi yang kredibel							
6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi						85	85

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Manajemen pengetahuan yang reliable							
7a-N	Tingkat pemanfaatan knowledge pata platform KLC	50	60	60	70	70	100	100
7b-N	Tingkat kematangan knowledge management						3	3
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-CP	Tingkat kualitas pngelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
8b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23	46	46	69	69	92	92
8c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	20		20		20	100	100
8d-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		3,55	3,55		3,55	3,55	3,55
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama						25	25
10	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
11	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
11a-CP	Indeks integritas organisasi						95,3	95,3

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik

Andin Hadiyanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
1.	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten/ Tingkat implementasi *learning organization*	Penguatan implementasi manajemen pengetahuan dan pembelajaran terintegrasi untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*	Terwujudnya Kemenkeu sebagai *learning organization* dengan tingkat implementasi LO tinggi (80%)	Pengelolaan manajemen pengetahuan yang koordinatif yang didukung dengan aplikasi *Knowledge Management System* yang andal untuk mendukung budaya belajar dan budaya berbagi pengetahuan	Penambahan tiga fitur pada aplikasi KMS	Tahun 2022	BPPK	-
				Penguatan implementasi pembelajaran terintegrasi secara kolaboratif antara BPPK dengan unit-unit eselon I untuk memaksimalkan *impact* pembelajaran terhadap pencapaian kinerja organisasi	KMK Pembelajaran terintegrasi	Tahun 2022		
				Penguatan budaya penciptaan pengetahuan, budaya belajar, dan budaya berbagi pengetahuan di tempat kerja baik di tingkat individu, kelompok, maupun di tingkat organisasi	Tingkat implementasi LO 80%	Tahun 2022		

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Andin Hadiyanto	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	196506091990121001	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	SDM keuangan negara yang kompeten	Tingkat implementasi learning organization	85
2	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten	Tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi	80
3	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	82
4	Pembelajaran yang relevant, applicable, impactful dan accessible	Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja	85
5	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70
6	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	85
7	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45
8	Pendidikan yang fit for purpose	Indeks kualiitas penelitian	335
9	Pendidikan yang fit for purpose	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	80
10	Pelatihan yang valid	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4
11	Pelatihan yang valid	Tingkat validasi program pembelajaran	100
12	Sertifikasi kompetensi yang kredibel	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	85
13	Manajemen pemanfaatan knowledge pada platform KLC	Tingkat pemanfaatan knowledge pata platform KLC	100

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
14	Tingkat kematangan knowledge management	Tingkat kematangan knowledge management	3
15	Penguatan tata kelola budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pngelolaan SDM	100
16	Penguatan tata kelola budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92
17	Penguatan tata kelola budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
18	Penguatan tata kelola budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
19	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
20	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	Tingkat penggunaan aset bersama	25
21	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
22	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	95,3
B. KINERJA TAMBAHAN			

Jakarta, 1 Januari 2022

Pegawai yang dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati
NIP -

ADDENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 11A/KK/2022

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: 11/KK/2022 tanggal 1 Januari 2022 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelumnya:

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45

b. Menjadi:

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,57

Jakarta, 23 Mei 2022

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Halaman ini sengaja dikosongkan.

bppk.kemenkeu.go.id

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA